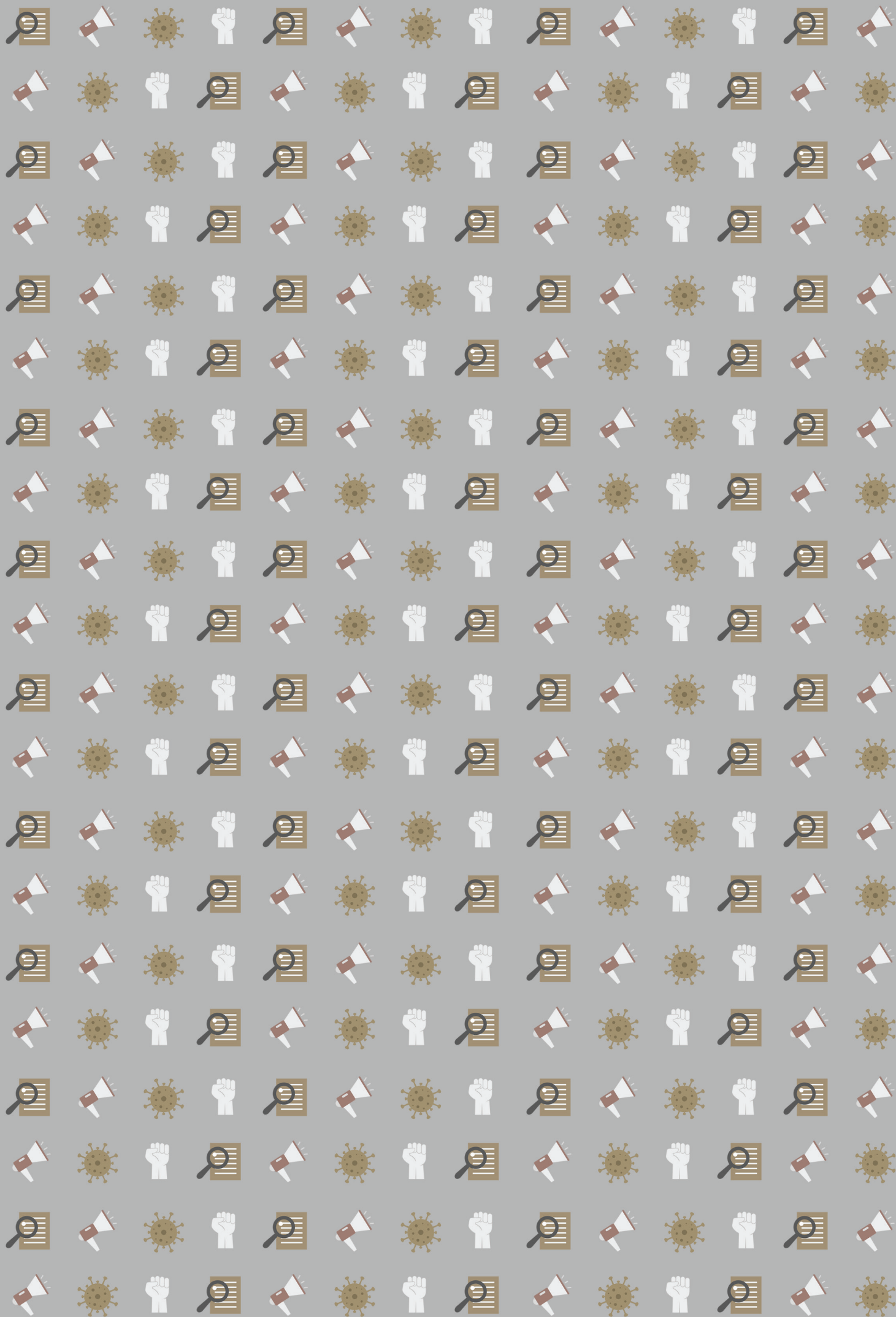


Laporan Studi

Pandemi, Demokrasi, dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia





Laporan Studi

**Pandemi, Demokrasi, dan
Ekstremisme Berkekerasan
di Indonesia**

The Habibie Center

Jakarta, Indonesia
Februari 2021





Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan yang kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Tim Peneliti

Imron Rasyid

Johari Efendi

Sopar Peranto

Mayka R.

Staf Pendukung

Natassa Irena Agam

Hanifa Zama Dinnata

Ashabul Kahfi

Daftar Isi

i	Daftar Isi
ii	Kata Pengantar
iii	Ringkasan Eksekutif
vii	Daftar Singkatan
1	LATAR BELAKANG
6	DINAMIKA DEMOKRASI SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
7	A. Dinamika Demokrasi Selama Pandemi COVID-19:
	 Sentralisasi Kekuasaan Dan Sekuritisasi
7	Politisasi dan Sentralisasi Kekuasaan
9	Sekuritisasi Penanganan Pandemi
11	B. Dinamika Demokrasi Selama Pandemi COVID-19 di Level Masyarakat
11	Kasus-Kasus Intoleransi Selama Pandemi
13	Pandemi Mengamplifikasi Tindakan Intoleransi yang Sudah Terjadi Jauh Sebelumnya
16	DINAMIKA ANCAMAN DAN PENANGANAN EKSTREMISME BERKEKERASAN SELAMA PANDEMI COVID-19
17	A. Dinamika Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia
17	Narasi COVID-19 dan Ekstremisme Berkekerasan
18	Pola dan Dinamika Kekerasan
19	Upaya Perekrutan Kelompok Ekstremisme Berkekerasan
20	Intoleransi dan Penguatan Kelompok Ekstremisme Berkekerasan
20	B. Penanganan Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi COVID-19
21	Perkembangan Penanganan Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi COVID-19
22	Sekuritisasi Penanganan Terorisme
24	Dampak Ketergantungan terhadap Aparat di Masa Pandemi dan di Masa Pascapandemi
25	TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
30	Daftar Pustaka

Kata Pengantar

Data menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang tercatat paling banyak korban pandemi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara. Hingga saat ini, belum tampak tanda-tanda bahwa Indonesia bisa menangani pandemi ini. Kondisi saat ini semakin mengkhawatirkan karena penyebaran virus semakin tinggi, sementara fasilitas medis di beberapa wilayah hampir kolaps.

Di tengah memburuknya kondisi pandemi, Indonesia juga dihadapkan pada kondisi memburuknya kehidupan demokrasi. Kondisi ini bukanlah hal baru karena tren penurunan indeks demokrasi Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2015. Tingkat kebebasan sipil yang telah menurun menjadi semakin sempit karena pembatasan-pembatasan fisik dan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Saluran-saluran demokrasi tidak berfungsi sebagaimana kondisi normal sebelum pandemi terjadi.

Pada saat yang bersamaan, kelompok ekstremisme berkekerasan tetap menjadi ancaman bagi Indonesia. Kelompok ini memanfaatkan krisis dan membangun narasi bahwa pandemi adalah saat yang tepat untuk meningkatkan perekrutan atau melakukan serangan. Hal ini sangat beralasan mengingat sebagian besar sumber daya pemerintah dialokasikan untuk menangani pandemi.

Untuk mengkaji kaitan antara pandemi, demokrasi, dan ekstremisme berkekerasan tersebut, tim peneliti Departemen Perdamaian dan Pembangunan The Habibie Center, didukung oleh Sasakawa Peace Foundation melakukan penelitian sejak Agustus hingga Desember 2020. The Habibie Center mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan data serta input dan komentar terhadap penelitian ini. Laporan ini menyajikan temuan-temuan penelitian tersebut.

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan temuan-temuan penelitian tentang hubungan antara pandemi COVID-19, demokrasi, dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia di tengah memburuknya kondisi global akibat terpaan pandemi di berbagai belahan dunia.

Pemerintah Indonesia tidak siap merespons pandemi secara strategis sehingga kasus aktif terus meningkat hingga saat ini. Respons sektoral terjadi cenderung tumpang tindih dan tanpa koordinasi, ditambah dengan koordinasi pusat dan daerah yang juga menghambat penanganan pandemi. Sementara itu, pembatasan berbagai aspek kegiatan masyarakat juga berdampak semakin menurunnya partisipasi publik. Kecenderungan ini mengamplifikasi tren penurunan indeks demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks itulah ancaman dari radikalisme dan ekstremisme berkekerasan tetap berlangsung di Indonesia. Kelompok teroris mengeksploitasi krisis sosial-ekonomi yang dipicu oleh pandemi dengan menyebarkan narasi bahwa pandemi ini adalah azab Tuhan. Mereka juga membangun narasi bahwa pandemi merupakan waktu yang tepat untuk melakukan serangan terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Kepemimpinan ISIS di level internasional juga diketahui telah berulang kali menyerukan kepada para pendukungnya untuk melakukan serangan dengan memanfaatkan kesibukan pemerintah dalam menangani pandemi.

Studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana memahami hubungan antara demokrasi, yang saat ini berada di bawah tekanan krisis pandemi, dan naik atau turunnya ekstremisme berkekerasan.

Empat temuan utama penelitian:

- 1 COVID-19 Mengamplifikasi Penurunan Demokrasi Indonesia**
Pembatasan pada setiap aspek yang dilakukan pemerintah dalam merespons pandemi membuat partisipasi publik semakin terbatas pada keputusan-keputusan politik penting di masa pandemi. Pemerintah juga melakukan sekuritisasi penanganan pandemi, khususnya dengan menempatkan aktor keamanan dalam struktur penanganan pandemi, serta pengerahan aktor keamanan untuk mendukung kebijakan penanganan COVID-19 di lapangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi tumpang tindih respons sektoral pemerintah pusat dalam upaya tanggap pandemi. Tarik menarik pusat dan daerah dalam penanganan pandemi pada akhirnya mengarah pada persepsi tentang adanya upaya penguatan sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat.

2 Gejala Intoleransi Meningkat selama Pandemi Dapat Menjadi *Enabling Factor* untuk Radikalisasi

Tindakan intoleransi yang terjadi sebagian besar masih sama dengan yang terjadi sebelum adanya pandemi, misalnya adanya upaya menghalangi ibadah atau menghalangi pembangunan rumah ibadah agama lain. Di sisi lain, berkembangnya kelompok-kelompok intoleran menjadi salah satu ajang bagi kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan untuk melakukan perekrutan. Bagi kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan, pandemi dipandang sebagai waktu yang tepat untuk melakukan penyebaran paham mereka.

3 Respons Kelompok Ekstremisme Berkekerasan terhadap Pandemi dan Penurunan Demokrasi

Kelompok ekstremisme berkekerasan membangun narasi bahwa pandemi COVID-19 adalah azab dari Tuhan, yang merupakan balasan atas kezaliman pemerintah, baik di dalam negeri maupun secara global. Kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan juga membangun narasi bahwa masa pandemi adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan karena pemerintah sedang mengerahkan hampir semua sumberdaya untuk merespons pandemi.

4 Perluasan Peran Militer dalam Penanganan Ekstremisme Berkekerasan

Dalam derajat tertentu pandemi COVID-19 juga melemahkan kemampuan aktor negara dan non negara dalam merespons ekstremisme berkekerasan. Pembatasan fisik dan sosial telah menghambat berbagai kegiatan kontraekstremisme berkekerasan dan deradikalisasi. Sebaliknya, yang lebih terlihat adalah sekuritisasi penanganan ekstremisme berkekerasan pada masa pandemi dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain. Selain itu, rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang melampaui peran dan kewenangannya. Kecenderungan menguatnya sekuritisasi penanganan ekstremisme berkekerasan dalam rancangan Perpres tersebut harus ditelaah lebih serius, khususnya terkait dengan implikasinya terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, sejarah Indonesia di masa lalu telah menunjukkan bahwa ketika posisi aktor-aktor keamanan sudah terlalu kuat maka upaya desekuritisasi akan sulit dilakukan sehingga mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi:

- 1** **Penguatan kembali peran masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat.** Memburuknya kualitas demokrasi selama pandemi perlu mendapat perhatian serius semua kalangan. Upaya-upaya perbaikan harus dilakukan, misalnya dengan memperkuat peran kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan negara.
- 2** **Menjamin akuntabilitas, *check and balance*, dan evaluasi pelibatan aktor keamanan dalam penanganan COVID-19.** Sekuritisasi penanganan pandemi telah berujung pada pelibatan aktif aktor-aktor keamanan dalam tugas-tugas di luar tugas utamanya. Harus diperhatikan bahwa kondisi ini bersifat sementara dalam situasi tidak normal seperti pandemi. Desekuritisasi dan pegembalian penanganan krisis kesehatan dan segala dampaknya ke dalam koridor politik normal harus segera dilakukan begitu situasi memungkinkan.
- 3** **Program-program berbasis komunitas yang menguatkan kohesi sosial dan solidaritas perlu didorong untuk mengurangi meningkatnya eksklusivitas kelompok di masyarakat selama pandemi.** Oleh karenanya, inisiatif-inisiatif berbasis komunitas ini harus terus didorong dan difasilitasi untuk memperkuat kembali kohesi sosial di tengah masyarakat.
- 4** **Penguatan kembali kontranarasi.** Kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan memiliki ketahanannya terhadap dampak pandemi. Mereka justru membangun narasi konspiratif untuk memperkuat ideologi ekstremisme berkekerasan dan mendelegitimasi otoritas negara. Program-program kontranarasi perlu didorong kembali untuk memutus dukungan terhadap kelompok ekstermisme berkekerasan.
- 5** **Transparansi, komunikasi publik terkait penanganan COVID-19, dan sinergi kebijakan lintas sektor dan pusat-daerah perlu ditingkatkan untuk melawan narasi ekstremisme berkekerasan.** Pemerintah perlu terus mendorong transparansi informasi publik terkait penanganan COVID-19. Persoalan sinergi kebijakan lintas sektor dan antara pusat dan daerah juga perlu diperbaiki. Ketika masyarakat melihat dan percaya bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah efektif maka narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan yang berusaha mendelegitimasi pemerintah akan kehilangan kredibilitasnya.

6 Program mitigasi dampak pandemi harus bersifat inklusif. Pemerintah dan masyarakat sipil harus memastikan bahwa program-program mitigasi dampak pandemi menjangkau dan diterima secara inklusif oleh seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Program penanganan COVID-19 yang efektif dan inklusif akan membuat kelompok masyarakat yang merasa termarginalkan terhindar dari menjadi sasaran empuk rekrutmen kelompok ekstremisme berkekerasan.

7 Rekomendasi mengenai riset lanjutan. Temuan-temuan dalam penelitian ini harus ditempatkan dalam konteks sosial-politik Indonesia. Sebagian gejala yang ditemukan unik untuk kasus Indonesia sementara sebagian lain konsisten dengan tren global. Oleh karena itu, diperlukan riset lanjutan dengan fokus yang diperluas, misalnya melalui penelitian komparatif dengan negara-negara lain di kawasan.

Daftar Singkatan

ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
BNPB	:	Badan Nasional Penanganan Bencana
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
UN-CTED	:	United Nations Security Council Counter-Terrorism Executive Directorate
Densus 88	:	Detasemen Khusus 88 Anti Teror
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	:	Focus Group Discussion
FPI	:	Forum Pembela Islam
GKPPD	:	Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HKBP-KSB	:	Huria Kristen batak Protestan Kota Serang Baru
IEU	:	Economist Intelligence Unit
IRA	:	Irish Republican Army
ISIS	:	Islamic State of Iraq and Syria
JAD	:	Jamaah Ansharut Daulah
JI	:	Jamaah Islamiyah
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Koopsus	:	Komando Operasi Khusus
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
KWI	:	Konferensi Waligereja Indonesia
MAT	:	Muhajirin Anshor Tauhid
Menkopolhukam	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
MIT	:	Mujahidin Indonesia Timur
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia



LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan dampak pandemi COVID-19 paling parah di kawasan Asia Tenggara. Data per Desember 2020 menunjukkan, jumlah kasus positif telah mencapai lebih dari 700,000 kasus dengan lebih dari 15 persen kasus aktif.¹ Jawa, pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia, menyumbang tambahan kasus harian terbanyak. Krisis kesehatan yang terus memburuk diikuti dengan proses pemulihan ekonomi yang cenderung lambat.²

Buruknya kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sedikit banyak disebabkan oleh kelambanan respons pemerintah, terutama di masa-masa awal pandemi. Saat banyak negara mulai memahami potensi dampak pandemi dan menyiapkan rencana penanganan, pemerintah Indonesia terkesan gamang dalam mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi penyebaran luas COVID-19. Kondisi ini diperparah dengan respons yang tumpang tindih tanpa koordinasi yang jelas, misalnya antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada bulan-bulan awal pandemi pemerintah juga banyak dikritik karena terkesan enggan memberikan informasi yang transparan tentang perkembangan pandemi.

Pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, demokrasi Indonesia justru mengalami tren kemunduran. Sejumlah survei dan indeks yang lazim digunakan untuk menakar kualitas demokrasi menggambarkan tren tersebut. Pada indeks tahunan *Freedom in the World* yang dirilis oleh Freedom House, Indonesia dilabeli “*partly free*” dengan skor demokrasi 61 pada skala 0-100—terdiri atas skor 30 untuk hak-hak politik (dari maksimal 40) dan 31 untuk kebebasan sipil (dari maksimal 60).³

1 “Indonesia,” Worldometer, diakses pada December 28, 2020, dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>.

2 Akhlas, Adrian Wail. (2020, 2 September). *Indonesia's 2021 economic recovery will not be at 'full power': Sri Mulyani*. Diakses pada 03 Februari 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/02/indonesias-2021-economic-recovery-will-not-be-at-full-power-sri-mulyani.html>

3 “Indonesia,” Freedom House, diakses pada De-

Indonesia dianggap masih menghadapi masalah terkait korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, separatisme, dan politisasi penggunaan aturan perundang-undangan tentang penistaan agama. Ini adalah tahun keempat berturut-turut Indonesia mengalami penurunan pada indeks *Freedom in the World*.

Sementara itu, *Democracy Index 2019* yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indonesia pada posisi 64 dari 167 negara dengan skor 6,48. Indonesia dilabeli “*flawed democracy*,” didefinisikan sebagai negara di mana pemilu yang adil dan bebas dilaksanakan namun masih terdapat masalah pada aspek-aspek lain demokrasi termasuk tata kelola pemerintahan, kultur politik, dan partisipasi politik.⁴ Tren ini sudah terlihat paling tidak sejak tahun 2017 ketika skor Indonesia pada *Democracy Index* turun drastis dari 6,97 di tahun sebelumnya menjadi 6,39.

Observasi tersebut diamini oleh publik domestik. Survei yang dilakukan Indikator Politik menunjukkan bahwa masyarakat merasa terjadi peningkatan ancaman dalam kebebasan sipil oleh negara selama masa pandemi COVID-19. Mayoritas responden cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat (79,6 persen), makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes (73,8 persen), dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa (57,7 persen).⁵

cember 28, 2020, dari <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>.

4 Texusjarana, Karina M. (2020, 22 Januari). *Indonesia, once regional model, falls further behind Malaysia in democracy rankings*. Diakses pada 03 Februari, dari <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html>

5 Putra, Nanda Perdana. (2020, 25 Oktober). *Survei Indikator Tunjukkan Meningkatnya Ancaman Kebebasan Sipil di Indonesia*. Diakses pada 03 Februari 2020, dari <https://www.liputan6.com/news/read/4391541/survei-indikator-tunjukkan-meningkatnya-ancaman-kebebasan-sipil-di-indonesia>

Memburuknya demokrasi Indonesia selama pandemi dapat dilihat dari sejumlah gejala. Pada tataran kebijakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi kekuasaan, termasuk penetapan sejumlah aturan yang dianggap kontroversial, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketergantungan terhadap dukungan politik jejaring aktor keamanan. Selain itu, sekuritisasi penanganan pandemi, melalui pelibatan aktif militer, berpotensi meninggalkan struktur norma dan aturan yang sulit dikembalikan ke kondisi normal bahkan setelah pandemi selesai. Sementara itu di tataran akar rumput, pandemi COVID-19 telah mengamplifikasi gejala-gejala intoleransi dan pelemahan kohesi sosial. Aksi-aksi pelarangan ibadah dan kekerasan atas nama agama masih kerap terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Kondisi menguatnya intoleransi berpotensi memperkuat prakondisi untuk menguatnya ideologi dan gerakan ekstremisme berkekerasan.

Di saat yang bersamaan, Indonesia masih terus menghadapi ancaman dari penyebaran ideologi dan aktivitas kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan. Momentum pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan untuk memperkuat konsolidasi internal, di antaranya melalui penguatan narasi dan strategi rekrutmen. Sebuah laporan yang disusun oleh UNICRI, misalnya, mencatat bagaimana kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menggunakan media sosial untuk menyebarkan teori-teori konspirasi tentang asal-usul COVID-19 dengan tujuan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sembari memperkuat legitimasi ideologi ekstremisme berkekerasannya.⁶

Upaya persiapan dan aksi kekerasan oleh kelompok-

6 Di antara teori-teori konspirasi yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaida termasuk bahwa virus COVID-19 adalah “tentara Allah” yang diturunkan untuk menghukum orang-orang kafir dan musuh-musuh umat Islam atau bahwa COVID-19 adalah azab Allah untuk negara-negara Barat. Lihat Soraya Binetti et al., “Stop the Virus of Disinformation: The Risk of Malicious Use of Social Media during COVID-19 and the Technology Options to Fight It” (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2020).

kelompok ekstremisme berkekerasan juga terus menjadi ancaman. Persepsi bahwa kondisi pengamanan melemah dan perhatian pemerintah yang terfokus pada penanganan pandemi mendorong kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan untuk melancarkan serangan. Di awal masa pandemi, misalnya, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang beroperasi di Poso, Sulawesi Tengah, melakukan penyerangan terhadap pos polisi. Kemudian berlanjut di bulan November, empat orang di Sigi, Sulawesi Tengah, diduga dibunuh oleh anggota kelompok MIT. Akibatnya, pemerintah juga terus memperpanjang pelaksanaan Operasi Tinombala untuk mengejar anggota kelompok MIT. Hingga 2020, Operasi Tinombala telah memasuki tahun kelima pelaksanaannya.

Dengan latar belakang tersebut, dirasakan adanya kebutuhan untuk menelaah lebih dalam dampak pandemi COVID-19 terhadap dinamika ancaman ekstremisme berkekerasan di tengah konteks kemunduran demokrasi, khususnya di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Sejumlah publikasi, baik berupa kertas kebijakan maupun analisis teoritik, telah membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap demokrasi. Laporan *Democracy under Lockdown* yang dikeluarkan oleh Freedom House, misalnya, menyimpulkan bahwa pandemi telah mempercepat penurunan kualitas demokrasi yang sudah terjadi selama satu setengah dekade terakhir.⁷ Hasil survei Freedom House menunjukkan bahwa di banyak negara, pemerintah merespons pandemi dengan menyalahgunakan kekuasaan, membungkam kritik, dan melemahkan institusi-institusi demokrasi. Tidak kurang dari 80 negara yang disurvei mengalami pemburukan kondisi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) selama pandemi. Freedom House memproyeksikan bahwa krisis tata kelola demokrasi yang sudah dimulai jauh sebe-

7 Repucci, S., & Slipowitz, A. (2020). *Democracy under lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom* (Special Report). Washington: Freedom House. Lihat juga Carothers, Thomas & O'Donohue, Andrew. (2020). *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace

lum pandemi kemungkinan besar akan terus berlanjut bahkan setelah krisis kesehatan ini selesai. Perangkat hukum dan norma yang diberlakukan selama pandemi akan sulit untuk dihilangkan kembali.

Kertas kebijakan berjudul *Addressing the Effect of COVID-19 on Democracy in South and Southeast Asia* yang dirilis oleh Council on Foreign Relations menyimpulkan hal yang serupa, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Selatan.⁸ Di banyak negara di kawasan ini, pandemi COVID-19 telah memberi kesempatan bagi pemimpin-pemimpin “illiberal” dan populis untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi, seringkali tanpa berkontribusi langsung pada respons terhadap krisis kesehatan yang sedang dihadapi. Upaya tersebut dilakukan di antaranya melalui penetapan aturan perundang-undangan baru yang memperluas otoritas eksekutif, memperkecil ruang untuk pengawasan terhadap pemerintah, menetapkan aturan-aturan kedaruratan, memarjinalisasi kelompok oposisi, serta memperkuat kendali terhadap proses perumusan aturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah di sejumlah negara juga sangat agresif dalam menyebarkan disinformasi untuk menutupi kegagalannya menangani krisis kesehatan.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap demokrasi juga menjadi perhatian komunitas akademik. Pada edisi Oktober 2020-nya, *Journal of Democracy* memuat tiga artikel yang melihat variasi respons terhadap pandemi dan dampaknya terhadap demokrasi sejumlah negara demokratis.⁹ Di Brazil, sikap Presiden Bolsonaro yang antagonistik, menurut Smith, telah memperkuat

polarisasi masyarakat dan politik partisan sehingga melemahkan kemampuan negara untuk mengatasi krisis kesehatan.¹⁰ Sementara itu, Mukherji dalam tulisannya berargumen bahwa di India Perdana Menteri Modi dengan piawai memanfaatkan krisis kesehatan untuk memperkuat “otoritarianisme kompetitif.”¹¹ Di Afrika Selatan, pemerintah berusaha mengatasi krisis dengan menggunakan pendekatan militerisasi penegakan hukum yang membahayakan kebebasan sipil.¹²

Sementara itu, belum banyak publikasi yang secara spesifik melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap natur dan karakteristik ancaman ekstremisme berkekerasan. Salah satu pengecualiannya adalah kajian awal yang dirilis oleh Institute of Development Studies di Inggris pada bulan Mei 2019 yang berusaha mengantisipasi potensi dampak pandemi COVID-19, dan respons terhadapnya, terhadap rekrutmen kelompok ekstremisme berkekerasan dan radikalisasi.¹³ Laporan tersebut melihat bagaimana COVID-19 dapat memperkuat faktor-faktor pendorong radikalisasi dan bergabungnya seseorang ke dalam jaringan ekstremisme berkekerasan dalam kerangka waktu jangka pendek, menengah, dan panjang.

8 Kurlantzick, Joshua. (2020). *Addressing the Effect of COVID-19 on Democracy in South and Southeast Asia*. Discussion Paper. Washington, D.C: Council on Foreign Relations.

9 The Editors. (2020). Covid vs. Democracy. *Journal of Democracy* 31, No. 4: 74–75. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0056>; Amy Erica Smith, “Covid vs. Democracy: Brazil’s Populist Playbook,” *Journal of Democracy* 31, no. 4 (2020): 76–90, <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0057>; Mukherji, R. (2020). Covid vs. Democracy: India’s Illiberal Remedy. *Journal of Democracy*, 31(4), 91-105. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0058>; Seekings, J., & Nattrass, N. (2020). Covid vs. Democracy: South Africa’s Lockdown Misfire. *Journal of Democracy*, 31(4), 106-121. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0059>

10 Smith, “Covid vs. Democracy.”

11 Mukherji, “Covid vs. Democracy.”

12 Seekings and Nattrass, “Covid vs. Democracy.”

13 Avis, W. (2020). *The COVID-19 Pandemic and Response on Violent Extremist Recruitment and Radicalisation*, K4D Helpdesk Report 808. Brighton, UK: Institute of Development Studies.



Dinamika Demokrasi Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia

Foto: Armin Abdul Jabbar/Pikiran Rakyat

Dinamika Demokrasi Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia

A. Dinamika Demokrasi selama Pandemi COVID-19: Sentralisasi Kekuasaan dan Sekuritisasi

Selama penanganan pandemi COVID-19, sejumlah dinamika terjadi yang berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Dua di antara dinamika tersebut—politikasi dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan sekuritisasi penanganan pandemi—berpotensi meninggalkan struktur hubungan negara-masyarakat yang tidak demokratis yang kemungkinan akan bertahan bahkan setelah masa pandemi selesai.

Politikasi dan Sentralisasi Kekuasaan

COVID-19 menghantam Indonesia di tengah tren kemunduran demokrasi.¹⁴ Sejumlah kebijakan yang diambil sejak periode pertama pemerintahan Jokowi dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi kekuasaan, termasuk penetapan sejumlah aturan yang dianggap kontroversial, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketergantungan terhadap dukungan politik jejaring aktor keamanan. Gejala-gejala yang mengarah ke otoritarianisme ini cenderung diperparah selama masa penanganan pandemi.

Penanganan COVID-19 di Indonesia cenderung lambat akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di masa-masa awal kemunculan pandemi.¹⁵ Hubungan antara Jokowi dan pemerintah dengan sejumlah kepala daerah sempat menegang ketika Gubernur Jakarta Anies Baswedan berniat menerapkan *lockdown* di Jakarta menyusul peningkatan jum-

lah kasus COVID-19.¹⁶ Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga berpandangan serupa. Dalam sejumlah survei, ketiga pemimpin daerah tersebut di atas seringkali muncul sebagai calon kuat untuk maju pada pemilihan presiden tahun 2024. Dengan demikian, kemampuan mengelola krisis dengan efektif melalui kepemimpinan yang kuat di daerah masing-masing menawarkan insentif elektoral bagi mereka yang berniat mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2024.¹⁷ Pemerintah pusat kemudian merespons dengan menegaskan bahwa kebijakan menerapkan *lockdown* adalah wewenang pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat akhirnya memilih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Penanganan COVID-19 juga diwarnai dengan munculnya sejumlah aturan perundang-undangan yang berpotensi memperkuat kekuasaan eksekutif. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan penanganan pandemi, proses perumusan aturan-aturan tersebut, serta substansinya, berpotensi memunculkan struktur tata kelola pemerintahan yang tidak demokratis yang akan bertahan bahkan setelah pandemi usai.

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada bulan Oktober, misalnya, banyak mendapat kritik luas karena proses perumusannya yang terkesan terburu-buru dan tertutup.¹⁸ Pemerintah terkesan memanfaatkan kondisi pandemi di mana mobilitas masyarakat terbatas sehingga risiko penolakan melalui aksi demonstrasi dapat diminimalisir. Secara substansi, Undang-

14 Lihat di antaranya Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307-338.; Bland, Ben. (2020). *Man of Contradictions: Jokowi and the Struggle to Remake Indonesia*. Sidney: Lowy Institute for International Policy, chap. 5..

15 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, September 23, 2020).

16 Gorbiano, Marchio Irfan, and Ghina Ghaliya. (2020, 1 April). *Turf War Undermines COVID-19 Fight in Indonesia*. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/turf-war-undermines-covid-19-fight-indonesia-government-jokowi-anies.html>.

17 Ghaliya, Ghina. (2020, 9 Juni). *Electability of Governors Ganjar, Ridwan Rises amid COVID-19's 'Electoral Incentives': Survey*. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/electability-of-governors-ganjar-ridwan-rises-amid-covid-19s-electoral-incentives-survey.html>.

18 Bardan, Abdul Basith. (2020, 3 November). *Pengamat: Ada Dua Poin Kuat Untuk Menggugat Omnibus Law*. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-ada-dua-poin-kuat-untuk-menggugat-omnibus-law>

Undang Cipta Kerja juga dikritik karena berpotensi memperkuat kekuasaan pemerintah pusat, misalnya dengan memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Sebagian pihak menilai kebijakan ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang seharusnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengatur regulasi pengembangan potensi lokal ekonominya.¹⁹

Di tengah pandemi, perdebatan juga muncul ketika pemerintah menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada parlemen pada bulan Mei. Rancangan aturan tersebut dikritik karena dianggap memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada TNI dalam penanggulangan terorisme serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.²⁰ Pendekatan militeristik dalam penanggulangan terorisme juga dianggap berpotensi membahayakan HAM.

Sejak sebelum pandemi, pemerintah Indonesia juga banyak dikritik atas pembatasan kebebasan berpendapat untuk kepentingan politik.²¹ Pemerintah dan aparat keamanan dianggap menggunakan Undang-Undang No. 11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menekan kritik kelompok oposisi.²² Menurut data yang dihimpun oleh South East Asian Freedom of Expression Network (SAFE-net) dan Amnesty International, jumlah kasus yang melibatkan

penggunaan UU ITE meningkat tiga kali lipat di masa pemerintahan Jokowi periode pertama (233 kasus) jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya (73 kasus).²³ Sepanjang 2019, kasus-kasus pemidanaan menggunakan UU ITE banyak menimpa jurnalis dan penggiat media serta aktivis.²⁴ Sebagian besar dituntut dengan pasal-pasal mengenai defamasi dan ujaran kebencian. Sementara itu, menurut data yang dikumpulkan oleh Amnesty International, selama periode 2014-2019, sebanyak 241 orang yang dipidana karena mengkritik pemerintah, 82 diantaranya dituduh mengeluarkan ujaran kebencian dan hinaan terhadap presiden.²⁵ SAFE-net, dalam laporannya mengenai situasi hak-hak digital di Indonesia tahun 2019, memproyeksikan bahwa situasi kemerdekaan berekspresi di Indonesia pada 2019-2024 berada di status "siaga satu".²⁶

Tren ini terus berlanjut selama masa pandemi.²⁷ Pada bulan Maret, polisi menetapkan status tersangka terhadap 51 orang yang dituduh menyebarkan hoaks terkait COVID-19 dan memblokir 38 akun media sosial.²⁸ Pada waktu yang berdekatan aparat keamanan juga menangkap tiga orang di Jakarta Utara yang menyebarkan informasi tentang adanya kasus COVID-19 di daerah tersebut serta tiga orang lain yang menyebarkan berita palsu tentang penutupan jalan tol akibat COVID-19.²⁹

23 Ibid.

24 Lihat Muhajir, Anton. (2020). Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network

25 Hamid, "Indonesia's Information Law Has Threatened Free Speech for More than a Decade. This Must Stop."

26 Muhajir, "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital," 21.

27 Human Rights Watch. (2020, 9 April). Indonesia: Little Transparency in COVID-19 Outbreak. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://www.hrw.org/news/2020/04/09/indonesia-little-transparency-covid-19-outbreak>.

28 Divisi Humas POLRI. (2020, 31 Maret). Polri Tetapkan 51 Tersangka Hoax Terkait Corona. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://humas.polri.go.id/2020/03/31/polri-tetapkan-51-tersangka-hoax-terkait-corona/>

29 Alfons, Matius. (2020, 31 Maret). Polisi Tangkap 3 Orang Terkait Hoax Corona Di Jakarta Utara. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4959095/polisi-tangkap-3-orang-terkait-hoax-corona-di-jakarta-utara>

19 Nalle, Victor Imanuel. (2020, 16 Oktober). Bagaimana UU Cipta Kerja merusak desentralisasi yang dibangun setelah reformasi. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://theconversation.com/bagaimana-uu-cipta-kerja-merusak-desentralisasi-yang-dibangun-setelah-reformasi-148091>

20 Arif, Muhamad. (2020). Menyoal Peran TNI Dalam Penanggulangan Terorisme. *THC Insights*, No. 14

21 Ross Tapsell, "Indonesia's Policing of Hoax News Increasingly Politicised," *ISEAS Perspective*, no. 75 (2019).

22 Hamid, Usman. (2019, 25 November). Indonesia's Information Law Has Threatened Free Speech for More than a Decade. This Must Stop. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://theconversation.com/indonesias-information-law-has-threatened-free-speech-for-more-than-a-decade-this-must-stop-127446>.

Di Palembang, seorang juru parkir diamankan setelah menyebarkan rekaman seorang pasien di sebuah rumah sakit yang disebutnya sebagai pasien COVID-19.³⁰

Selain hoaks terkait kasus COVID-19, aparat keamanan juga menggencarkan patrol siber untuk menjerat orang-orang yang dianggap menghina pemerintah dalam kaitannya dengan penanganan pandemi.³¹ Seorang pemuda diamankan pada awal April setelah mengunggah ke media sosial rekaman dirinya mengeluarkan lontaran yang dianggap hoaks dan menghina presiden.³² Pada bulan Oktober, dalam rangka mengantisipasi unjuk rasa dan aksi mogok buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja, kepolisian kembali menggelar patroli siber untuk menjerat penyebar hoaks terkait undang-undang kontroversial tersebut.³³

Sekuritisasi Penanganan Pandemi

Secara teoritik, sekuritisasi terjadi ketika sebuah aktor keamanan, dalam hal ini negara, menjadikan sebuah isu non-keamanan menjadi isu keamanan karena dianggap mengancam objek acuan (*referent object*) tertentu, dalam hal ini negara itu sendiri atau masyarakat. Proses sekuritisasi terjadi melalui proses *speech act* yang dilakukan oleh aktor keamanan.³⁴ Ketika sebuah isu

sudah menjadi isu keamanan, aktor keamanan memiliki ruang untuk melakukan penanganan di luar koridor politik normal (*extraordinary measures*), termasuk pengerahan aparat keamanan.

Dalam konteks Indonesia, sekuritisasi penanganan pandemi dapat dilihat pada beberapa perkembangan. *Pertama*, narasi “kedaruratan” yang muncul dalam konteks penanganan COVID-19. Dari perspektif pemerintah, sebagai sebuah bencana yang belum pernah ada presedennya, COVID-19 tidak dapat ditangani dengan pendekatan kelembagaan demokratis normal. Tata kelola penanganan COVID-19 harus dilakukan dalam koridor kebencanaan yang fleksibel dan adaptif untuk bisa menghasilkan respons yang cepat.³⁵ Dalam kerangka sekuritisasi, pengulangan terus menerus narasi kedaruratan ini dapat dilihat sebagai bentuk *speech act*.

Dengan terus meningkatnya jumlah korban, meluasnya cakupan wilayah yang terdampak, dan meluasnya implikasi sosial-ekonomi akibat pandemi ini, pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 12/2020 menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Melalui ketetapan tersebut pemerintah memiliki ruang lebih longgar untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, termasuk anggaran pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sebelumnya hanya berperan sebagai pelaksana dan koordinator penanganan COVID-19 kini juga dilengkapi dengan fungsi komando.³⁶

Selain itu, karena dianggap secara masif mengganggu aktivitas ekonomi dan mengancam sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah

30 Siregar, Raja Adil. (2020, 3 Maret). Sebar Video Hoax Pasien Positif Corona, Juru Parkir Di Palembang Ditangkap. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4958534/sebar-video-hoax-pasien-positif-corona-juru-parkir-di-palembang-ditangkap>

31 Timdetikcom. (2020, 5 April). Darurat Corona, Polri Patroli Khusus Pantau Hoax Dan Penghinaan Presiden. Diakses pada 29 Desember 2020, dari https://news.detik.com/berita/d-4966256/darurat-corona-polri-patroli-khusus-pantau-hoax-dan-penghinaan-presiden?utm_source=twitter&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news.

32 Tim detikcom. (2020, 7 April). Bola Salju Kasus Ali Baharsyah Hina Jokowi Via Isu Wabah. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial-ada-31-kasus-intoleransi-di-indonesia-mayoritas-pelarangan-ibadah>

33 Halim, Devina. (2020, 5 Oktober). Soal Telegram Kapolri Berisi Perintah Patroli Siber, Polri: Untuk Cegah Hoaks Omnibus Law. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/15125181/soal-telegram-kapolri-berisi-perintah-patroli-siber-polri-untuk-cegah-hoaks?page=all>.

34 Lihat Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde,

J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.

35 “Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan,” (The Habibie Center, September 23, 2020).

36 Aria, Pingit. (2020, 14 April). Dampak Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19 Terhadap Anggaran. Diakses pada 1 Januari 2021, dari <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a41c97e9e4/dampak-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19-terhadap-anggaran>

luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara. Pada bulan Maret, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi. Perpu tersebut, di antaranya, melonggarkan batasan defisit Produk Domestik Bruto (PDB) hingga tahun 2022 serta melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*). Sebagai catatan, dalam tata aturan perundang-undangan di Indonesia, Perpu hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah jika dirasa ada situasi genting yang memaksa.

Kedua, pelibatan perwira militer aktif dan purnawirawan di posisi-posisi kunci terkait penanganan COVID-19. Pada periode kedua pemerintahannya, ketergantungan Jokowi terhadap jejaring aktor keamanan, khususnya militer, memang terlihat semakin menguat. Sejumlah posisi penting di kabinet dipegang oleh perwira militer purnawirawan, termasuk posisi-posisi yang sebelumnya biasanya ditempati oleh tokoh sipil, seperti Menteri Kesehatan yang dijabat Terawan Putranto dan Menteri Agama Fachrul Razi.³⁷ Tokoh-tokoh militer lain yang memegang posisi kunci di pemerintahan antara lain Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), dan Wiranto (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden). Di Kementerian Kesehatan Terawan juga sempat dibantu oleh beberapa pejabat purnawirawan TNI, termasuk Achmad Yuriyanto yang di bulan-bulan pertama pandemi sempat memegang peran penting sebagai juru bicara pemerintah untuk urusan COVID-19. Pada bulan Maret, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mengoordinasikan pendekatan *whole-of-government* dalam penanganan pandemi. Gugus Tugas diketuai oleh Doni Monardo, seorang perwira militer aktif yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Salah satu posisi wakil ketua Gugus Tugas juga

ditempati oleh perwira senior TNI. Dalam kapasitasnya masing-masing, para pejabat ini memegang peranan penting dalam penanganan pandemi di Indonesia.

Selain di level nasional, perwira militer juga terlibat dalam penanganan COVID-19 di tingkat daerah. Per Mei 2020, ada sekitar 225 perwira militer yang berada dalam struktur penanganan COVID-19.³⁸ Sebagian besar dari perwira militer ini menempati posisi wakil ketua gugus tugas penanganan COVID-19 yang dibentuk di level provinsi, kota, dan kabupaten.³⁹ Dalam sistem politik Indonesia, hal ini dimungkinkan berkat adanya struktur komando teritorial TNI Angkatan Darat yang paralel dengan struktur pemerintahan sipil, sehingga di tingkat daerah perwira militer, terutama yang berasal dari Angkatan Darat, seringkali menjadi bagian dari forum pimpinan kolektif.

Ketiga, penggelaran kekuatan aktor-aktor keamanan, termasuk militer, dalam implementasi kebijakan penanganan COVID-19. Pada bulan Mei, pemerintah, dalam rangka penegakan disiplin selama masa "normal baru," memutuskan untuk mengerahkan tidak kurang dari 340.000 personel militer dan kepolisian di empat provinsi—Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo—serta 25 kabupaten dan kota. Di Jakarta dan sekitarnya, per bulan Juni, TNI sudah menurunkan kurang lebih 6.221 personel, ditambah 3.909 personel kepolisian.⁴⁰ Jumlah ini terhitung sangat besar jika dibandingkan dengan operasi-operasi militer selain perang yang pernah dijalankan oleh TNI sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada periode 2015-2016, TNI mengerahkan 57.000 personel untuk program penyuluhan pertanian; 3.300 personel gabungan TNI dan Polri untuk operasi lawan teror di Poso pada periode 2015-2016; 15.000-20.000 personel untuk membantu penanganan bencana alam di Aceh tahun 2014.⁴¹

37 Pada *reshuffle* kabinet bulan Desember 2020, posisi Letjen (Purn) dr. Terawan Putranto sebagai Menteri Kesehatan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin dan posisi Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama digantikan oleh Yaqut Cholil Quomas. Keduanya tokoh sipil.

38 Laksmana, Evan A., and Rage Taufika. (2020). How 'Militarized' Is Indonesia's COVID-19 Management? Preliminary Assessment and Findings. CSIS Commentaries, No. DM-RU-075-EN (2020).

39 Ibid.

40 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan," (The Habibie Center, September 23, 2020).

41 Ibid.

Dalam artian yang lebih luas, tata kelola sektor keamanan juga mencakup komunitas intelijen. Dalam hal ini, kita dapat melihat peran yang cukup besar yang diambil oleh badan-badan intelijen, baik sipil maupun militer, selama penanganan COVID-19. Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini memang menjadi bagian dari tugas pokoknya, seperti melakukan analisis pola persebaran dan dampak pandemi, badan-badan intelijen juga banyak terlibat dalam konteks penanggulangan, misalnya pelacakan kasus COVID-19, mengadakan *rapid test* masal, mobilisasi relawan dan tenaga kesehatan, distribusi alat-alat kesehatan, hingga melakukan riset bersama untuk menemukan obat COVID-19.⁴² Bahwa pandemi dilihat sebagai ancaman kemanan manusia (*human security*) menjadi justifikasi keterlibatan badan-badan intelijen dalam penanganan COVID-19 melalui operasi intelijen medis (*medical intelligence*).⁴³

Pelibatan aparat keamanan, khususnya militer, memang menjadi pilihan yang dianggap logis oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selain memberikan efek gentar dalam menegakkan disiplin masyarakat selama masa “normal baru,” penerimaan masyarakat terhadap keberadaan personel TNI juga cenderung positif.⁴⁴ Dalam berbagai survei, TNI seringkali muncul sebagai institusi negara yang mendapat kepercayaan paling tinggi dari publik.⁴⁵ Hal ini juga menegaskan ketergantungan pemerintahan Jokowi terhadap dukungan politik jejaring aktor keamanan. Kondisi ini, jika terus berlanjut, akan berpotensi menyisakan struktur tata kelola pemerintahan yang semakin tidak

demokratis bahkan setelah pandemi usai.

B. Dinamika Demokrasi Selama Pandemi COVID-19 di Level Masyarakat

Pandemi COVID-19 di Indonesia sejak awal 2020 sampai saat ini memunculkan dinamika demokrasi khas di level masyarakat. Hal yang terlihat adalah masih adanya berbagai tindakan intoleransi seperti yang biasa terjadi sebelum adanya pandemi. Di sisi lain, fenomena pandemi yang ada ikut mengamplifikasi kemunculan intoleransi di masyarakat.

Kasus-kasus Intoleransi Selama Pandemi

Hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama tahun 2019 mengarah pada kesimpulan akhir di mana semua provinsi di Indonesia memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi dan sangat tinggi.⁴⁶ Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa tindakan intoleransi masih terjadi di beberapa daerah. Dari data media yang dikumpulkan oleh Imparsial pada periode November 2018-November 2019 tercatat 31 kasus intoleransi, mayoritas terkait kasus pelarangan ibadah.⁴⁷

Tindakan intoleransi berupa pelarangan tempat ibadah dan pelarangan ibadah, yang di tahun sebelumnya mendominasi tindakan intoleransi, masih muncul juga di tahun 2020. Tindakan nyata intoleransi pelarangan tempat ibadah terjadi di Aceh. Sedangkan tindakan menghalangi, melarang, ataupun melarang pelaksanaan ibadah terjadi di berbagai daerah seperti di Bekasi, Bogor, dan Mojokerto, yang semuanya terjadi di bulan September 2020.

Pada bulan September di Aceh Singkil, Aceh, muncul tindakan intoleransi berupa pelarangan tempat ibadah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui surat

42 “Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan” (The Habibie Center, January 27, 2021).

43 Timdetikcom. (2020, 28 September). Kenapa Intelijen Terlibat Tangani COVID-19? Ini Penjelasan BIN. Diakses pada 30 Januari 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5191310/kenapa-intelijen-terlibat-tangani-covid-19-ini-penjelasan-bin>

44 “Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan,” September 23, 2020.

45 Sari, Haryanti Puspa. (2020, 22 Juli). Survei Charta Politika: TNI, Lembaga Dengan Tingkat Kepercayaan Tertinggi. Diakses pada 1 Januari 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/19095841/survei-charta-politika-tni-lembaga-dengan-tingkat-kepercayaan-tertinggi>

46 Prabowo, Haris. (2019, 11 November). Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://tirto.id/daftar-skor-indeks-kerukunan-beragama-versi-kemenag-2019-engH>.

47 Alfons, Matius. Imparsial: Ada 31 Kasus Intoleransi di Indonesia, Mayoritas Pelarangan Ibadah. Diakses pada 10 Desember 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial-ada-31-kasus-intoleransi-di-indonesia-mayoritas-pelarangan-ibadah>

teguran dari Bupati untuk menghentikan pembangunan rumah pendeta di tanah Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD). Surat teguran itu didasarkan atas pertimbangan demi menjaga ketertiban dan kerukunan antar-umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.⁴⁸

Masih di bulan yang sama, terjadi tindakan menghalangi pelaksanaan ibadah di Bekasi. Saat sedang menjalankan ibadah, jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan Kota Serang Baru (HKBP KSB) diganggu oleh sekelompok massa di luar gereja. Massa di luar gereja bernyanyi dengan suara keras serta menyalakan pengeras suara dengan tujuan untuk mengganggu pelaksanaan ibadah yang sedang berjalan di dalam gereja.⁴⁹ Tindakan menghalangi ibadah juga terjadi di Jonggol, Kabupaten Bogor, di mana tindakan serupa dilakukan oleh sekelompok orang yang dengan alasan gereja yang menjadi tempat ibadah tersebut melanggar aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama ijin pembangunan tempat ibadah. Upaya menghalangi ibadah tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang namun juga oleh aparat pemerintah lokal.⁵⁰ Tindakan intoleran yang terjadi di Mojokerto dilakukan oleh kepala desa melalui surat resmi yang ditujukan kepada warganya untuk tidak memasang simbol agama dan menjadikan rumah sebagai tempat beribadah.⁵¹

48 innews.co.id. (2020, 27 September). Bupati Aceh Singkil Hentikan Pembangunan Rumah Pendeta. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://innews.co.id/bupati-aceh-singkil-hentikan-pembangunan-rumah-pendeta/>

49 Raharjo, Dwi Bowo. (2020, 17 September). Sekelompok Orang Ganggu Ibadah Jemaat HKBP Serang, Ketum PKPI: Memalukan. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.suara.com/news/2020/09/17/203950/sekelompok-massa-ganggu-ibadah-jemaat-hkbp-serang-ketum-pkpi-memalukan?page=all>

50 Indonews.com. (2020, 22 September). Umat Gereja di Jonggol Mengaku Dilarang Beribadah. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.koranindonews.com/2020/09/22/umat-gereja-di-jonggol-mengaku-dilarang-beribadah/>

51 Santoso, Bangun. (2020, 28 September). Heboh Larangan Beribadah di Desa Ngastemi, Ketum PKPI: Tindakan Bodoh!. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.suara.com/news/2020/09/28/074649/heboh-larangan-beribadah-di-desa-ngastemi-ketum-pkpi-tindakan-bodoh?page=all>

Bentuk lain dari tindakan intoleransi sudah mulai masuk ke ranah dan struktur pendidikan. Contoh dari tindakan tersebut adalah bagaimana guru secara jelas mengajarkan dan mengarahkan tindakan siswa pada intoleransi. Di Yogyakarta, 10 Januari 2020, muncul tindakan nyata intoleransi di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, di mana instruktur melalui nyanyian yel-yel "*Islam yes, kafir no*."⁵²

Sementara itu seorang guru di sebuah sekolah di Jakarta secara aktif—dengan kekuasaan yang dimilikinya—memengaruhi dan mengarahkan proses pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sesuai dengan agendanya. Ketika ada pemilihan ketua OSIS dengan kandidat yang berbeda agama, muslim dan nonmuslim, guru tersebut secara sengaja membuat dan menyebarkan pesan melalui sosial media pada murid-murid untuk tidak memilih calon ketua OSIS nonmuslim.⁵³

Hampir semua kasus intoleransi yang terjadi di masa pandemi sebagian besar melibatkan kelompok agama yang berbeda. Namun tindakan intoleransi juga terjadi antar kelompok yang menganut agama yang sama, namun berbeda pandangan tentang suatu hal. Seperti terjadi pada bulan Agustus 2020 di Solo, di mana sekelompok massa mendatangi sebuah acara syukuran persiapan pernikahan keluarga dan meminta acara dihentikan. Kelompok massa juga melakukan kekerasan berupa penganiayaan terhadap anggota keluarga yang menyelenggarakan acara syukuran serta merusak barang di sekitar lokasi acara syukuran.⁵⁴

52 Wicaksono, Pribadi. (2020, 14 Januari). DPRD Minta Pembina Pramuka Ajarkan 'Islam Yes Kafir No' Dihukum. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/1295087/dprd-minta-pembina-pramuka-ajarkan-islam-yes-kafir-no-dihukum>

53 Marison, Walda. (2020, 28 Oktober). Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-muslim. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/28/09441991/kronologi-ulah-rasial-guru-sma-di-jaktim-tiba-tiba-ajak-murid-tak-pilih>

54 Kompas.com. (2020, 12 Agustus). Kasus Pembubaran Paksa Acara Midodareni di Solo, Kapolda Jateng: Kita Kejara Pelaku Lainnya. Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/07000091/kasus-pembubaran-paksa-acara-midodareni-di-solo-kapol->

Pandemi Mengamplifikasi Tindakan Intoleransi yang Sudah Terjadi Jauh Sebelumnya

Dari deskripsi di awal tulisan, bisa dikatakan tidak ada yang siap menghadapi pandemi. Di tingkat masyarakat hal tersebut terlihat dari isu yang sederhana terkait larangan beribadah di tempat ibadah. Himbauan atas larangan itu dikeluarkan oleh semua lembaga keagamaan seperti Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵⁵ MUI melalui fatwa No. 14 Tahun 2020 meminta umat Islam untuk tidak melakukan sholat Jumat di masjid. Fatwa tersebut ditanggapi masyarakat secara berbeda dan terkadang memunculkan ketegangan. Muncul narasi-narasi fanatik konservatif yang berlebihan atas aturan pelarangan melakukan ibadah di masjid atau tempat-tempat ibadah. Muncul juga sentimen negatif serta narasi kebencian kepada pemerintah. Hal tersebut tidak hanya di kelompok konservatif namun juga di kelompok moderat tradisional seperti juga di Nahdatul Ulama (NU).⁵⁶ Penutupan tempat ibadah yang cukup lama juga sempat memunculkan narasi negatif di mana pemerintah dipersepsi bersikap diskriminatif, di mana pemerintah menutup tempat-tempat ibadah, namun memperbolehkan tempat umum, seperti mall, tetap buka.⁵⁷

Sebagian besar tindakan intoleran yang terjadi di masa pandemi masih terkait atau sama dengan tindakan intoleran pada masa sebelum pandemi. Dari analisis didapati bahwa hanya sedikit dari tindakan intoleran tersebut yang terkait langsung dengan isu pandemi.

[da-jateng--kita-kejar?page=all](#)

55 Purnamasari, Deti Mega. (2020, 29 Maret). Imbauan Sejumlah Organisasi Keagamaan Terkait Ibadah di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/29/09243331/imbauan-sejumlah-organisasi-keagamaan-terkait-ibadah-di-tengah-pandemi-covid?page=all>

56 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, October 8, 2020).

57 Nugroho, AS & Yusuf, Ali. (2020, 21 Mei). Penutupan Tempat Ibadah Mulai Menggelisahkan., Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://www.republika.id/posts/6874/penutupan-tempat-ibadah-mulai-menggelisahkan>

Salah satu contoh terjadi di Bekasi, di mana karena alasan pandemi sebuah keluarga memutuskan untuk melakukan ibadah di rumah. Namun ternyata ibadah yang dilakukan di rumah pribadi dan hanya melibatkan keluarga tersebut dihalangi dan tidak diperbolehkan oleh orang lain dengan alasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁵⁸ Dalam insiden intoleransi tersebut pelaku secara sadar mengamplifikasi alasan pandemi untuk melakukan dan menjustifikasi tindakan intoleransi yang dilakukannya.

Dalam suasana pandemi COVID-19, adanya tindakan intoleran di masyarakat menjadi fenomena tersendiri dan kontradiktif di masa tanggap bencana. Tindakan intoleran masih muncul ketika kebersamaan dan kemanusiaan sangat dibutuhkan untuk menghadapi pandemik. Hal tersebut jelas sebuah anomali atas kecenderungan psikologi manusia pada umumnya dalam menghadapi pandemi dan kemalangan, di mana orang cenderung untuk berkolaborasi ketimbang berkompetisi.⁵⁹

Tindakan intoleran di masa pandemi bukan hal yang biasa, tetapi menjadi penanda bahwa fenomena intoleransi di Indonesia adalah masalah yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Pandemi seperti tidak berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya tindakan intoleransi di masyarakat. Berbagai keterbatasan bergerak karena adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi pandemi, tidak menghambat dan meyurutkan sekelompok massa atau orang untuk melakukan tindakan intoleran. Kekhawatiran atas masalah intoleransi di masa pandemi banyak disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil, aparat pemerintah dan juga aparat keamanan.

Parahnya, permasalahan intoleransi tidak hanya ada di tataran masyarakat, tapi juga sudah masuk ke lingkungan akademis. Hasil survei persepsi moderasi beragama di kelompok mahasiswa dan perguruan tinggi

58 "Agar 'Pelarangan Ibadah' di Cikarang Tidak Terulang" April 21, 2020, <https://tirto.id/agar-pelarangan-ibadah-di-cikarang-tidak-terulang-ePXM>

59 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan." (The Habibie Center, September 23, 2020).

di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) se-Indonesia dengan 300 responden menyebutkan, terdapat 30 orang responden mengaku sebagai anggota Forum Pembela Islam (FPI). Uniknya, Mereka setuju pada moderasi beragama, tapi FPI bagi mereka dianggap dibenarkan melakukan hal-hal yang intoleran.⁶⁰ Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang kontradiktif dari mereka yang secara akademik lebih tinggi bahwa mereka menjadi bagian dari kelompok yang dianggap intoleran meskipun secara prinsip setuju pada moderasi beragama.

Fenomena masih munculnya tindakan intoleransi di masa pandemi ini mendapat perhatian khusus dari kepala negara. Salah satu pesan yang secara jelas disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-PBB ke-11 adalah meminta PBB untuk menjaga kemajemukan dan toleransi. Pernyataan presiden ini didasarkan atas keprihatinan di masa pandemi masih terjadi intoleransi beragama dan tindak kekerasan atas nama agama. Pembiaran akan hal tersebut bisa menyuburkan radikalisme dan ekstremisme.⁶¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa intoleransi adalah lapisan luar yang mengarah pada munculnya radikalisme dan ekstremisme. Lapisan tersebut saling terkait, menopang, dan mendukung. Ada tiga patron utama kelompok ekstrem radikal: pertama, mereka yang sudah tergabung dengan kelompok-kelompok teroris seperti *Jamaah Islamiyah* (JI), *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur; kedua, kelompok-kelompok intoleran, dan; ketiga, kelompok moderat yang sering mengangkat isu radikal sebagai isu populis mereka.⁶² Walaupun intoleransi terkait dengan radikalisme dan ekstremisme berkekerasan,

penanganan atas tindakan intoleransi dilakukan dengan instrumen hukum pidana biasa, bukan dengan instrumen hukum pidana terorisme.⁶³

Relasi antara intoleran, radikalisme, dan ekstremisme juga diakui oleh salah satu bekas pimpinan kelompok teroris. Kelompok teror atau ekstremisme berkekerasan diuntungkan dengan adanya kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Proses rekrutmen kelompok teror menjadi lebih mudah dengan adanya kelompok radikal dan intoleran ini. Mereka tinggal melihat dan memfokuskan pada orang-orang anggota kelompok radikal yang sudah menjadi super radikal untuk selanjutnya bisa ditarget untuk menjadi calon potensial anggota kelompok teror.⁶⁴

Masih adanya tindakan intoleransi di masa pandemi semakin menguatkan perlunya upaya menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi di Indonesia, sebagai langkah awal memitigasi munculnya kelompok radikal dan juga kelompok ekstremis.

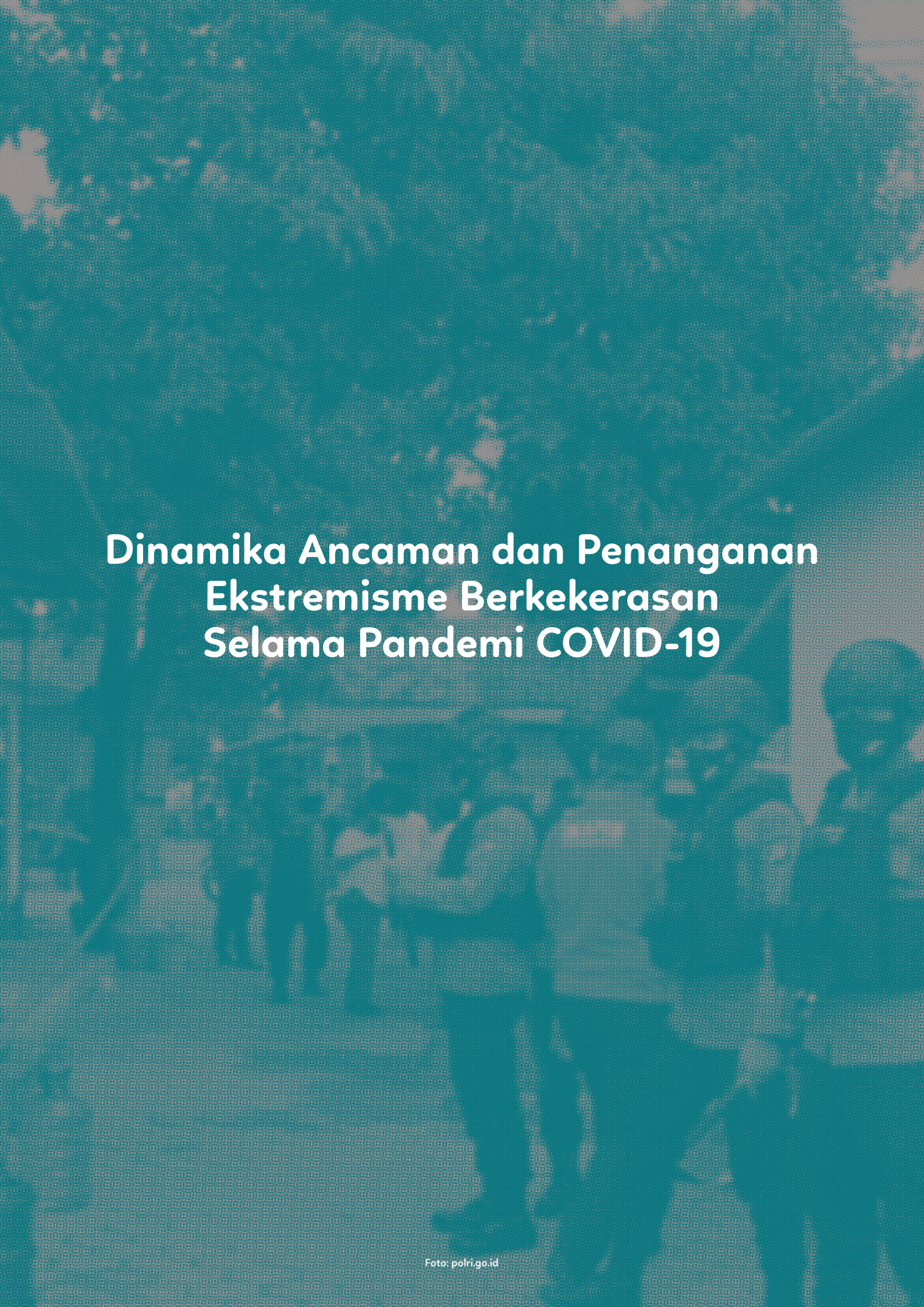
60 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan." (The Habibie Center, Oktober 8, 2020).

61 Adyatama, Egi. (2020, 15 November). KTT ASEAN-PBB, Jokowi Minta PBB Bantu Akses Vaksin dan Dorong Toleransi. Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/1405526/ktt-asean-pbb-jokowi-minta-pbb-bantu-akses-vaksin-dan-dorong-toleransi/full&view=ok>

62 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan." (The Habibie Center, Oktober 8, 2020).

63 Ibid.

64 Wawancara Pengamat Terorisme, 27 Oktober 2020.



Dinamika Ancaman dan Penanganan Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi COVID-19

Dinamika Ancaman dan Penanganan Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi COVID-19

A. Dinamika Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia

Selama pandemi COVID-19, persoalan ekstremisme berkekerasan terus berjalan dinamis di Indonesia. Kelompok ekstremisme berkekerasan merespons pandemi COVID-19 dengan beragam narasi. Tak hanya itu, pola dan dinamika kekerasan juga tetap terlihat selama masa pandemi 2020. Upaya rekrutmen terus dilakukan meskipun dihadapkan dengan beragam halangan (seperti kebijakan PSBB).

Narasi COVID-19 dan Ekstremisme Berkekerasan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia turut mempengaruhi gerakan ekstremisme berkekerasan secara global. Setidaknya terdapat tiga pandangan kelompok ekstremisme berkekerasan global terhadap wabah COVID-19. *Pertama*, ISIS mengeluarkan panduan tentang COVID-19 untuk para pendukung dan simpatisan mereka agar menjauhi wilayah pandemi dan tidak melakukan perjalanan ke daerah yang terkena dampak, misalnya Eropa. Sedangkan bagi para pendukung yang tinggal di wilayah terdampak pandemi diperintahkan untuk tidak keluar dari wilayah tersebut.⁶⁵ Pada 13 Maret, dalam bulletin berita online Al-Naba, ISIS mendorong para pendukung dan simpatisannya untuk mencuci tangan dan menutup mulut saat menguap atau bersin. Seruan tersebut bersumber pada Al-Qur'an dan hadits.

Kedua, pandemi COVID-19 merupakan azab/murka Tuhan terhadap orang yang tidak percaya Allah (kafir).⁶⁶ Menurut ISIS, penyakit ini diturunkan di tengah masyarakat sebagai "tentara Tuhan" guna menghancurkan musuh-musuh "kelompok Islam,"

terutama pihak barat yang telah membunuh Abu Bakr al-Baghdadi dan hukuman terhadap Cina yang memperlakukan kelompok muslim Uighur dengan buruk. Akibat pandangan ini, dalam video rekaman ibu-ibu yang berada dalam tempat penampungan di Syria yakin bahwa COVID-19 bukan lah penyakit untuk mereka yang percaya. Oleh karena itu, mereka tidak merasa takut dengan penyakit tersebut karena itu bukan untuk para pendukung dan simpatisan ISIS.

Ketiga, pandemi COVID-19 adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan terhadap musuh yang saat ini sedang lemah karena menghadapi penyakit menular. Menurut Coleman (2020), ISIS telah mendesak para pengikutnya untuk terus melakukan jihad dan memanfaatkan kondisi keamanan yang lemah di setiap negara untuk meluncurkan serangan. Tak hanya itu, publikasi di sosial media yang mengatasnamakan Rasyid Nikaz (tokoh muslim Perancis) pada Maret 2020 menyerukan untuk menggunakan masa pandemi ini sebagai kesempatan untuk melakukan aksi-aksi jihad. Seruan yang disampaikan jelas, yakni untuk melakukan aksi *amaliyah*. Seruan tersebut beredar dengan menggunakan bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, seruan tersebut beredar luas kepada beragam kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah jika terdapat beragam narasi global tentang pandemi COVID-19, lalu bagaimana respons gerakan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Sejalan dengan bulletin Al-Naba, pandangan pimpinan *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD) wilayah Jawa juga mengonfirmasi bahwa virus COVID-19 adalah bagian dari tentara Allah.⁶⁷ Tak hanya itu, pandemi ini bagian dari azab Allah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Di tengah narasi inilah kelompok-kelompok ekstremisme tersebut terus menjalankan strategi "dua sisi mata uang," di mana pada satu sisi mereka bertahan dari pandemi ini dan, di sisi lain, juga aktif, khususnya di ranah media sosial, untuk mobilisasi dukungan masyarakat terhadap aksi-aksi mereka. Taktik lebih banyak menggunakan media sosial

65 SITEIntelligence Group. (2020) "Global Jihadist Response to COVID-19 Pandemic," SiteIntelligence Special Report. (lihat tweets @Rita_Katz)

66 Ibid.

67 Wawancara Pengamat Terorisme, 27 Oktober 2020.

bukannya tanpa alasan di masa pandemi ini. Pada Maret 2020, PSBB diberlakukan di hampir seluruh provinsi Indonesia sehingga menyebabkan masyarakat banyak berada di rumah dan mengakses internet lebih banyak. Dengan demikian, kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan ini berharap siaran agenda dan ideologi mereka mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk meraih jangkauan yang lebih luas dan waktu paparan yang lebih banyak dari para pengguna media sosial.

Lebih lanjut, kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia juga beranggapan bahwa ketika pandemi COVID-19 ini berkembang luas dan menyebar secara masif, maka negara menjadi lemah karena perhatian pemerintah tertuju sepenuhnya kepada penanganan pandemi.⁶⁸ Kondisi tersebut dianggap sebagai potensi kelemahan dari sisi keamanan, terutama kewaspadaan aparat kepolisian dan TNI. Salah satu aparat yang terlibat dalam FGD penelitian ini menyebutkan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, kelompok JAD masih tetap fokus kepada polisi dan pemerintah sebagai target utama dalam aksi-aksi kekerasan mereka.

Tak jauh berbeda dengan kelompok JAD, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora juga menjadikan masa pandemi sebagai kesempatan melakukan aksi serangan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Ali Kalora memanggil masyarakat terutama di Poso untuk melakukan aksi *amaliyah* dengan menggunakan momen pandemi COVID-19. Narasi yang diserukan adalah “*Thogut* (mereka yang dekat dengan perilaku setan) akan jatuh dan tersungkur dengan Corona, dengan peperangan ini insyaAllah dalam waktu dekat.” Kelompok tersebut menganggap bahwa penyakit ini adalah bantuan dari Tuhan untuk menjatuhkan para pendukung *thagut*, termasuk pemerintah, polisi, dan TNI. Oleh karena itu, bagi mereka momen ini adalah peluang yang tepat karena bantuan Tuhan sudah datang dan Tuhan sudah memberikan restu untuk melakukan perlawanan.

Pola dan Dinamika Kekerasan

68 “Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan” (The Habibie Center, Oktober 8, 2020).

Seperti disebutkan di atas, masa pandemi COVID-19 tidak menghentikan upaya dan tindakan aksi kekerasan kelompok ekstremisme berkekerasan. Bahkan, diawal penerapan PSBB di Indonesia, kelompok MIT melakukan penyerangan terhadap pos polisi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada 27 Maret 2020. Tidak berselang lama, tepatnya 15 April 2020, dua orang anggota Ali Kalora turun dari gunung ke kota dan berusaha untuk merampas senjata polisi di depan Bank Syariah Mandiri di Poso. Dua pelaku tersebut tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian. Pada tanggal 19 April 2020, kelompok MIT melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap seseorang bernama Ajeng alias Bapak Angga karena dianggap sebagai informan polisi karena dia adalah anggota Bantuan Polisi (Banpol). Serangkaian aksi kekerasan kelompok MIT terus berlanjut hingga kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 27 November 2020.

Dari hasil FGD penelitian ini diketahui bahwa kelompok JAD juga masih melakukan serangan terhadap pihak aparat kepolisian. Seperti upaya penyerangan terhadap Mapolsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan yang diduga akan dilakukan oleh kelompok JAD Kalimantan Selatan pada Juni 2020. Lebih lanjut, kelompok *Jemaah Islamiyah* (JI) yang ditangkap di Surabaya pada bulan Mei-Juni mencoba untuk membangun kekuatan lalu memanfaatkan kelemahan pemerintah ini dengan menyusupi geng motor.⁶⁹ Pada saat itu, mereka juga berupaya untuk merencanakan kekacauan (*chaos*) di beberapa daerah di Tasikmalaya. Harapannya setelah kekacauan terjadi, mereka dengan senjata yang beli dari jaringan senjata gelap kemudian melakukan pembunuhan kepada pemilik-pemilik toko beretnis Tionghoa dan lain-lain.

Kelompok *Muhajirin Anshor Tauhid* (MAT) juga melakukan upaya serangan terhadap Markas TNI-Polri di Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi tersebut dapat digagalkan oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada 8 Juni 2020. Pada kasus ini, media sosial menjadi salah satu medium yang digunakan untuk

69 “Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan”

operasi serangan. Skema penyerangan sekaligus upaya mengobarkan semangat jihad anggota MAT dilakukan melalui grup WhatsApp.

Upaya Perekrutan Kelompok Ekstremisme Berkekerasan

The Soufan Center (2020) menyebutkan bahwa Pandemi COVID-19 adalah peristiwa langka yang berpotensi dimanfaatkan berbagai kelompok teroris dan ekstremis untuk mempromosikan ideologi dan narasi mereka. Pandemi COVID-19 telah mendorong kelompok dan pendukung ekstremisme berkekerasan untuk beradaptasi dan mengelaborasi upaya perekrutan di Indonesia. Misalnya, di beberapa wilayah yang menerapkan PSBB yang relatif ketat di mana kegiatan bersama atau kerumunan dilarang, kelompok ekstremisme berkekerasan juga menahan diri. Terlebih lagi, di awal PSBB sebagian besar kegiatan berkumpul di masjid ditiadakan. Sebagai contoh, Abu Ruzdan dari kelompok JI, yang biasanya sibuk mengisi acara taklim dan pengajian mengurangi kegiatan berkelilingnya.⁷⁰

Pada awal pandemi COVID-19, konsolidasi internal di dalam kelompok menjadi penting dan dilakukan secara daring (*online*). Pemanfaatan media daring memang telah lama digunakan, bahkan sebelum PSBB. Namun, di awal pandemi konsolidasi daring lebih intensif dengan menyerukan narasi COVID-19 sebagai peluang atau kesempatan untuk melakukan aksi *amaliyah*. Hasil wawancara dengan pengamat terorisme Indonesia menunjukkan bahwa percakapan group WhatsApp (WA) masih aktif, terutama di group WA pengajian.⁷¹ Topik pembicaraan utama masih tentang COVID-19 sebagai tentara tuhan dan seruan-seruan kekerasan terhadap *thogut*. Tak hanya itu, pembahasan bagaimana mereka mengkontekstualisasikan masalah tantangan kehidupan saat ini dalam narasi agama menjadi salah satu isu utama.

Dalam konteks pandemi, kelompok ekstremisme berkekerasan menganggap bahwa ini adalah saat tepat

untuk melakukan serangan balik dan perekrutan. Mereka melakukan upaya perekrutan anggota-anggota dengan menarik simpati melalui beragam aksi terutama yang terkait COVID-19. Pandemi COVID-19 dianggap oleh kelompok ekstremisme berkekerasan sebagai kesempatan mereka untuk menguat baik secara keuangan maupun sumber daya manusia. Mereka membuka pusat bantuan kemanusiaan, pendidikan alternatif yang murah untuk masyarakat (membuka sekolah tahfizh, pesantren, dari PAUD hingga Madrasah Aliyah).⁷²

Kelompok ISIS Akhwat secara jelas menyatakan bahwa mereka akan mempekerjakan anggota-anggota ISIS dan simpatisan yang dipecat dari pekerjaannya akibat COVID-19. Tak hanya itu, mereka juga menerima orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya meskipun di luar kelompok ISIS. Media sosial yang berafiliasi dengan kelompok ISIS dan JI menyerukan bahwa mereka akan melakukan apapun yang mereka mampu untuk perekrutan. Seruan ini ingin mengajak pendukung, simpatisan, dan masyarakat luas untuk melakukan dan mengembangkan kapasitas, termasuk kemampuan menyerang, di saat negara dalam kondisi lemah karena pandemi. Menurut mereka, aksi yang dilakukan tidak selalu harus dimanifestasikan melalui serangan teror, namun juga tindakan lain yang lebih bervariasi, seperti penggalangan dana dan propaganda di media sosial.

Lebih lanjut, di masa pandemi, pertemuan secara daring sangat penting untuk konsolidasi kelompok, misalnya kegiatan baiat. Namun demikian, serangan biasanya tetap dilakukan pertemuan secara luring (*offline*). Ini dapat dilihat dari kasus penyerangan anggota JAD terhadap Mapolsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan pada Juni 2020 dan serangan anggota MAT terhadap markas TNI-Polri di NTB Juni 2020.⁷³ Oleh karena itu, upaya melakukan aksi *amaliyah*, peran, dan keterlibatan

70 Wawancara Pengamat Terorisme, 30 Oktober 2020.

71 Wawancara Pengamat Terorisme, 27 Oktober 2020.

72 Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan” (The Habibie Center, January 27, 2021)

73 CNN Indonesia. (2020, 8 Juni). Densus 88 Bekuk Terduga Teroris JAD di Cirebon dan Kalsel. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200608174922-12-511144/densus-88-bekuk-terduga-teroris-jad-di-cirebon-dan-kalsel>

kelompok kecil secara fisik dan/atau tatap muka masih sangat tinggi dan diperlukan.

Intoleransi dan Penguatan Kelompok Ekstremisme Berkekerasan

Selama pandemi COVID-19, maraknya isu intoleransi menjadi lahan subur (*enabling environment*) bagi kelompok ekstremisme berkekerasan untuk memperkuat upaya radikalisasi pendukung dan simpatisan. Di awal pandemi, retorika anti-Tionghoa terjadi sangat intensif di beberapa situs media sosial kelompok ekstremis yang pro-ISIS. Hal ini tidak terlepas dari kemunculan virus ini yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Bahkan, mereka menganggap bahwa virus ini dibuat sebagai senjata biologis untuk memusnahkan Muslim Uyghur, namun bocor dan menyebar di wilayah Wuhan.⁷⁴ Sentimen anti-Tionghoa terus menguat dengan adanya pemberitaan sebanyak 49 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara pada Maret 2020.⁷⁵ Seorang warga merekam video kedatangan TKA tersebut dan memberinya judul “Satu pesawat, semua korona,” yang kemudian viral dan memicu protes publik secara luas. Dalam laporan IPAC April 2020 disebutkan bahwa persoalan tersebut mendorong peluang seruan rasial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-ISIS di media sosial.⁷⁶

Isu intoleransi lainnya adalah terkait sentiment anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berkembang luas di tengah pandemi COVID-19. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya upaya pemerintah dan DPR untuk merumuskan Rancangan UU Haluan Ideologi

Pancasila (HIP). Aliansi masyarakat yang berafiliasi dengan Persatuan Alumni (PA) 212 dan FPI melakukan serangkaian aksi demonstrasi sepanjang Juni dan Juli 2020 guna menolak disahkannya RUU HIP. Mereka menganggap bahwa undang-undang tersebut akan melemahkan kelompok Islam dan membuka ruang kebangkitan kelompok Neo PKI.

Dalam wawancara dengan salah satu pengamat terorisme Indonesia, serangkaian gerakan dan aksi protes tersebut digunakan kelompok ekstremisme berkekerasan untuk memajukan agenda mereka.⁷⁷ Pada saat ada demo-demo yang mendiskreditkan pemerintah, mereka ikut terlibat dalam demonstrasi. Mereka ikut demo bukan karena setuju dengan isu tersebut, namun agar dikenal juga oleh kelompok-kelompok yang lain agar lebih mudah merekrut anggota baru. Menurut mereka, jauh lebih mudah merekrut orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal atau intoleran dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang gerakan pro-Islam. Hal tersebut terjadi karena pada kelompok radikal atau intoleran tersebut telah tertanam rasa kemarahan, dendam, dan kebencian terhadap pemerintah maupun kelompok di luar mereka. Fenomena ini dapat dilihat pada tahun 2011 di mana pelaku penyerangan di Masjid Mapolres Cirebon sering terlibat demo anarkis. Setelah itu, ia diincar dan dikader untuk menjadi pelaku bom bunuh diri karena dianggap memiliki semangat yang besar terhadap perjuangan membela agama.

B. Penanganan Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi COVID-19

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kelompok ekstremisme berkekerasan tetap aktif pada masa pandemi ini. Pada saat ini, organisasi tersebut lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan penyebaran paham radikal-ekstremnya. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak merancang plot-plot serangan teror. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa situasi pandemi tidak menurunkan tingkat anca-

74 Salim, Hanz Jimenez. (2020, 5 Februari). Cek Fakta: Klaim Virus Corona untuk Musnahkan Uighur tapi Malah Bocor di Wuhan, Faktanya?. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4172296/cek-fakta-klaim-virus-corona-untuk-musnahkan-uighur-tapi-malah-bocor-di-wuhan-faktanya>

75 Warta Ekonomi. (2020, 2 Desember). Buset!! 49 Pekerja China yang Masuk Indonesia Ternyata Orang Baru. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read276842/buset-49-pekerja-Tionghoa-yang-masuk-indonesia-ternyata-orang-baru>

76 Institute for Policy Analysis Conflict. (2020). Covid-19 and The Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT). IPAC Short Briefing No.3.

77 Wawancara Pengamat Terorisme, 30 Oktober 2020.

man radikalisme dan terorisme.⁷⁸ Di sisi lain, pengalokasian sebagian besar sumber daya untuk menangani pandemi juga memengaruhi kemampuan penanggulangan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Mengingat kondisi di atas, sangat penting untuk mencermati bagaimana kesiapan aktor negara dan nonnegara dalam melakukan penanggulangan ekstremisme berkekerasan di masa Pandemi

Perkembangan Penanganan Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi

United Nations Security Council Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED) telah mengidentifikasi dampak jangka pendek dan jangka panjang Pandemi COVID-19. Dampak jangka pendek berkaitan dengan bagaimana organisasi ekstremisme berkekerasan merespons perubahan perilaku publik karena pembatasan fisik dan interaksi sosial selama pandemi. Beberapa isu yang penting diperhatikan adalah adanya *"captive audiens"* atau orang-orang menghabiskan waktu dengan kegiatan daring selama masa pandemi. Sementara di sisi lain, kelompok teroris memiliki kemampuan dan kesempatan yang luas melakukan propaganda melalui dunia maya. Kelompok teroris juga memanfaatkan pandemi sebagai sarana melakukan kegiatan yang berkedok kemanusiaan, namun agenda sebenarnya adalah untuk kegiatan terorisme.⁷⁹ Salah satu contohnya adalah data yang disampaikan oleh aparat keamanan bahwa kelompok ekstremisme berkekerasan mengumpulkan dana kemanusiaan dari masyarakat melalui kotak amal di masjid-masjid untuk mendanai aksi teror.⁸⁰

78 "Mahfud MD: Terorisme Tak Berkurang di Tengah Pandemi Covid," CNN Indonesia, 3 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201201161646-20-577164/mahfud-md-terorisme-tak-berkurang-di-tengah-pandemi-covid>

79 United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, "The Impact of the Covid-19 Pandemic on Terrorism, Counter-Terrorism, and Countering Violent extremism, June, 2020, <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%9393-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf>

80 Rezkisari, Indira. (2020, 3 Desember). Kotak Amal Minimarket dan Dugaan Pendanaan Jamaah Islamiyah. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://republika.co.id/berita/qkr3ej328/kotak-amal-emminimarketem-dan-dugaan-pendanaan-jamaah-islamiyah>

Selanjutnya, menurut CTED, dampak jangka panjang pandemi ini adalah berkurangnya sumber daya untuk melakukan program penanggulangan terorisme, baik oleh aktor negara maupun aktor nonnegara. Pandemi juga membuat potensi pendanaan dari bantuan internasional untuk program kontraekstremisme berkekerasan akan sangat berkurang akibat runtuhnya ekonomi global.⁸¹

Tantangan penanggulangan terorisme di masa pandemi tersebut terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Sebagaimana disebutkan, para kelompok ekstremisme berkekerasan berupaya memanfaatkan kelengahan pemerintah yang tengah sibuk merespons pandemi. Pada kondisi seperti ini, kesiapsiagaan aparat keamanan menjadi kunci untuk menekan dan menghentikan upaya serangan teroris. Sejak 1 Januari hingga 8 Oktober 2020, Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) Polri tercatat telah berhasil menangkap 170 orang. Dari total jumlah tersebut, sebagian besar berafiliasi pada JAD (105 orang), JI (25 orang), MIT (20 orang), tidak berafiliasi tetapi mendukung ISIS Global (15 orang), dan sisanya belum diketahui.

Data dari Densus 88 menunjukkan peningkatan jumlah penangkapan terduga teroris ketika pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Maret 2020. Penangkapan ini adalah tindakan preventif yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok teroris yang mencoba melakukan serangan.⁸² Sebagian plot serangan teroris telah direncanakan sebelum masa pandemi terjadi di Indonesia. Kemampuan aparat keamanan melakukan pemantauan dan penangkapan membuat sebagian besar plot serangan tersebut dapat

[ita/qkr3ej328/kotak-amal-emminimarketem-dan-dugaan-pendanaan-jamaah-islamiyah](https://republika.co.id/berita/qkr3ej328/kotak-amal-emminimarketem-dan-dugaan-pendanaan-jamaah-islamiyah)

81 United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, "The Impact of the Covid-19 Pandemic on Terrorism, Counter-Terrorism, and Countering Violent extremism, June, 2020, <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%9393-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf>

82 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, October 8, 2020).

digagalkan.⁸³

Di balik keberhasilan tersebut, perlu dicatat bahwa realokasi sumber daya pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 setidaknya telah berpengaruh kepada tiga aspek, yaitu menurunnya kemampuan aparat keamanan untuk memutakhirkan perangkat teknologi pendukung dalam memantau kelompok ekstremisme berkekerasan, berkurangnya kesempatan bagi petugas untuk melakukan program deradikalisasi, dan berkurangnya program dukungan untuk para penyintas serangan teroris. Ketiga aspek ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, hingga saat ini, realokasi sumber daya pemerintah untuk penanganan pandemi memang belum berpengaruh terhadap kegiatan operasional rutin penindakan terorisme. Akan tetapi, penanganan pandemi tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan melakukan pemutakhiran atau peningkatan teknologi untuk mendukung kemampuan Densus 88. Selain itu, pengurangan anggaran juga berpengaruh pada intensitas kegiatan penindakan sehingga perlu strategi yang kuat untuk melakukan pergerakan pasukan sesuai dengan prioritas strategis.⁸⁴ Berkurangnya kemampuan tersebut berpotensi memberi peluang lebih besar bagi kelompok ekstremis, terutama untuk bergerak di dunia maya. Di sisi lain, sebagaimana telah disinyalir oleh CTED, penggunaan internet yang lebih besar, khususnya oleh anak-anak dan pemuda di masa pandemi lebih memungkinkan mereka terpapar oleh pesan-pesan kelompok ekstremis yang masuk ke dalam media sosial atau kelompok permainan online.⁸⁵

Kedua, pandemi dan respons pemerintah terhadap pandemi juga berpengaruh terhadap program

deradikalisasi. Setidaknya terdapat dua tantangan besar dalam program deradikalisasi di masa pandemi, yaitu, (1) realokasi sumber daya secara besar-besaran untuk menangani pandemi telah membuat terbatasnya kemampuan visitasi petugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang terlatih sehingga kegiatan deradikalisasi hanya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan keahlian yang terbatas; dan (2) pembatasan fisik dan sosial selama pandemi membuat proses deradikalisasi sulit dilakukan karena larangan adanya kegiatan tatap muka dan kerumunan.⁸⁶

Pandemi ini menunjukkan bahwa desentralisasi kompetensi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus dilakukan. Dalam kondisi di mana desentralisasi kemampuan deradikalisasi telah berjalan, petugas pusat bisa berperan sebagai *supervisor* daripada harus menjalankan program secara langsung. Pemerataan kompetensi ini juga memungkinkan program deradikalisasi tetap berjalan walaupun terjadi pembatasan visitasi dari pusat. Di samping itu, pemerataan kompetensi ini akan membuat pembagian peran yang lebih merata antara pusat dan daerah sekaligus memangkas biaya operasional, misalnya untuk visitasi.

Ketiga, pandemi dan penanganannya juga memengaruhi dukungan atau pelaksanaan program-program pendampingan terhadap penyintas serangan teroris. Pembatasan sosial di masa pandemi ini membuat pertemuan-pertemuan tatap muka dengan penyintas tidak mungkin dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, perlu dirancang program pendampingan yang tidak memerlukan pertemuan langsung sehingga dukungan terhadap penyintas tetap berjalan.⁸⁷

Sekuritisasi Penanganan Terorisme

Sekuritisasi penanganan terorisme juga mewarnai

83 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, September 27, 2020).

84 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, October 8, 2020).

85 Kruglanski, A. W., Gunaratna, R., Ellenberg, M., & Speckhard, A. (2020). Terrorism in time of the pandemic: exploiting mayhem. *Global Security: Health, Science and Policy*, 5(1), 121-132.

86 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, October 8, 2020).

87 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, October 8, 2020).

berbagai diskusi pada masa pandemi ini. Diskusi tersebut menguat sejak rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme begulir di DPR. Sebagian publik mengkritisi rancangan Perpres tersebut, terutama berkaitan dengan persoalan akuntabilitas operasi militer dalam penanggulangan terorisme, potensi pelanggaran HAM, dan ancaman terhadap supremasi sipil dalam negara demokrasi.

Sebelumnya, pada 30 Juli 2019, Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan pendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Menurut Panglima TNI, anggota Koopssus memiliki kualifikasi untuk melaksanakan berbagai operasi khusus dalam upaya kontra terorisme melalui tiga fungsi, yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan.⁸⁸

Luasnya peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dipandang telah melampaui wewenangnya. Komisi Nasional (Komnas) HAM, misalnya, menyatakan bahwa TNI bukanlah aparat penegak hukum melainkan alat pertahanan negara. Oleh karenanya, pelibatan militer baru dilakukan ketika teror sudah mengancam kedaulatan negara bukan dalam kerangka penegakan hukum.⁸⁹ Koalisi masyarakat sipil juga memandang bahwa sebagai alat pertahanan negara, militer tidak seharusnya mengambil peran dalam pencegahan

terorisme dan pemulihan karena peran tersebut seharusnya dilakukan di bawah koordinasi BNPT. Keterlibatan TNI dalam dua aspek tersebut berpotensi menimbulkan konflik antarlembaga dalam program kontraterorisme.⁹⁰

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah mengatur peran TNI dalam penanggulangan terorisme, baik sebagai tugas pokok TNI dalam melindungi kedaulatan negara maupun operasi militer selain perang. Dalam konteks operasi militer selain perang, pengerahan pasukan TNI merupakan hal terakhir yang dilakukan (*last resort*) dengan melihat derajat ancaman terorisme terhadap kedaulatan negara dan bukan sebagai proses penegakan hukum. Keputusan untuk melibatkan TNI juga harus diambil melalui keputusan politik oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Oleh karenanya, penggunaan peraturan presiden untuk mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidaklah tepat. Hal yang perlu dilakukan adalah justru membuat undang-undang yang mengatur tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme perbantuan untuk menggunakan TNI terhadap pemerintahan sipil. Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme menjadi bagian dalam undang-undang tersebut.⁹¹

Selain itu, pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme juga dipandang belum mendesak karena serangan teroris di Indonesia saat ini masih berskala kecil dan penanganannya relatif berhasil. Pengerahan pasukan yang memakan biaya besar belum tentu mencapai hasil yang sepadan, misalnya Operasi Tinombala di Sulawesi Tengah.⁹² Pada tahun ini saja,

88 Ardito Ramadhan. (2019, 30 Juli). Mengenal Koopssus TNI, Satuan Elite Gabungan Tiga Matra TNI. Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/11254361/mengenal-koopssus-tni-satuan-elite-gabungan-tiga-matra-tni?page=all>

89 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019, 8 Agustus). Press Release, Perpres Pelibatan Tni Dalam Tindak Pidana Terorisme, Anomali Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://www.komnasham.go.id/files/20190808-perpres-pelibatan-tni-dalam-tindak-§JODSM.pdf>

90 Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil. (2020, 9 Mei). Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM di Indonesia, diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Siaran-Pers-Perpres-TNI-9-mei-2019.pdf>

91 Briantika, Adi. (2020, 15 Mei). Mengapa Perpres TNI Tangani Terorisme Dianggap Bermasalah?. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://tirto.id/mengapa-perpres-tni-tangani-terorisme-dianggap-bermasalah-ftQl>

92 DA, Ady Thea. (2020, 11 Juni). Akhiri Polemik Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Ketentuan Ini Perlu Dicabut. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee0d0420950a/akhiri-polemik-pelibatan-tni-tangani-terorisme--ketentuan-ini-perlu-dicabut>

gelar pasukan untuk Operasi Tinombala telah dilakukan dalam tiga tahap, tetapi belasan orang anggota MIT belum juga tertangkap.⁹³ Kelompok ini justru melakukan pembakaran dan pembunuhan empat orang dalam satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 27 November 2020 yang lalu. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pengiriman pasukan berjumlah besar dalam operasi tersebut efektif atau cukup mengirimkan sedikit pasukan tetapi bisa bekerja secara efisien.

Harus diakui bahwa ancaman ekstremisme berkekerasan selalu berubah-ubah di tempat dan waktu yang berbeda. Akan tetapi, tidak ada informasi yang menyatakan bahwa penilaian situasi saat ini telah menemukan fakta bahwa pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah perlu dan mendesak. Walaupun mendapat kritik dari berbagai pihak, pembahasan Perpres menjelang masa akhir sidang DPR disinyalir sebagai cara untuk membahas isu penting ini secara cepat.⁹⁴ Hal ini mengindikasikan semakin terbatasnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan penting di Indonesia.

Dampak Ketergantungan pada Aparat di Masa Pandemi dan Pascapandemi

Dampak jangka panjang pandemi terhadap program kontra ekstremisme berkekerasan lebih mengkhawatirkan daripada dampaknya sekarang. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, di antaranya prioritas pemerintah lebih besar kepada rehabilitasi ekonomi, meningkatnya kemiskinan, melebarnya jurang kemiskinan akibat memburuknya ekonomi, dan semakin rentannya kaum muda terhadap perekrutan teroris karena meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.⁹⁵

93 "Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan" (The Habibie Center, September 27, 2020).

94 CNN Indonesia. (2020, 4 Oktober). Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Disebut Akal-akalan. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201004030725-32-554082/perpres-pelibatan-tni-tangani-terorisme-disebut-akal-akalan>

95 Mullins, S. (2020). Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic on Terrorism and Counter-Terrorism: Practitioner Insights. Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Se-

Berbagai faktor dampak jangka panjang pandemi terhadap upaya kontraekstremisme berkekerasan tersebut menegaskan perlunya antisipasi terhadap permasalahan pelambatan ekonomi yang akan mengurangi sumber daya untuk penanggulangan terorisme dalam jangka panjang secara signifikan.⁹⁶ Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, menguatnya ketergantungan sipil terhadap dukungan aktor keamanan sangat kentara dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Kondisi pandemi dan respons terhadap pandemi mengamplifikasi ketergantungan tersebut, khususnya karena aktor keamanan memiliki kemampuan pergerakan cepat dan garis komando.

Terkait implikasi pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di masa pascapandemi, sebaiknya pemerintah belajar dari pengalaman beberapa negara di mana respons secara militer terhadap terorisme secara berlebihan justru memicu resistensi dan konflik lanjutan di jangka panjang. Misalnya, dampak tindakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bush ketika melakukan operasi militer di Afganistan dan Irak dan eksesi pengerahan militer Inggris menghadapi paramiliter Irish Republican Army (IRA) di Irlandia Utara yang justru meningkatkan dukungan publik kepada kelompok nasionalis.

Selain itu pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme juga berpotensi menjadi tindakan yang sulit diubah kembali di masa depan (*irreversible*).⁹⁷ Indonesia sendiri telah mengalami sulitnya melakukan desekuritasi peran TNI di ranah sipil pada masa lalu saat pemberlakuan konsep dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Oleh karena itu, wewenang, prosedur, dan tata cara pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme harus diatur dengan jelas dengan mempertimbangkan derajat ancaman terorisme terhadap kedaulatan negara.

curity Studies.

96 Gary, A., & Hayley, P. (2020). Terrorism and COVID-19: Actual and Potential Impacts. Perspectives on Terrorism, 14(3), 59-73.

97 Tim Peneliti The Habibie Center. (2018). Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme. Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan, The Habibie Center, Edisi 01/Maret 2018.



Temuan Utama dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan Utama

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi hubungan antara pandemi COVID-19, demokrasi, dan ekstremisme berkekerasan. Hubungan antara pandemi, baik dengan demokrasi maupun ekstremisme berkekerasan bukanlah hubungan satu arah, di mana pandemi memengaruhi demokrasi dan ekstremisme berkekerasan, namun juga terdapat respons institusi demokrasi maupun kelompok ekstremisme berkekerasan terhadap pandemi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada derajat tertentu, pandemi telah memengaruhi upaya-upaya penanganan ekstremisme berkekerasan, baik oleh aktor pemerintah maupun nonpemerintah. Bagian ini akan menjabarkan temuan-temuan penting penelitian ini.

1 COVID-19 Mengamplifikasi Penurunan Demokrasi Indonesia

Penanganan pandemi ini dapat diibaratkan sebagai perang semesta, di mana segenap masyarakat dan pemerintah berjuang bersama-sama. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah yang bisa memberdayakan setiap komponen pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, pemerintah justru menerapkan pembatasan pada setiap aspek sehingga banyak pengekangan dan pembatasan partisipasi publik di masa pandemi, misalnya dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah juga menunjukkan kebijakan yang kontradiktif, misalnya menganjurkan masyarakat untuk diam di rumah, tetapi di saat yang bersamaan justru membuka mall dan pusat-pusat keramaian lainnya. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan sekuritisasi penanganan pandemi, khususnya dengan menempatkan aktor keamanan dalam struktur penanganan pandemi, serta pengerahan aktor keamanan untuk mendukung kebijakan penanganan COVID-19 di lapangan.

Terkait dengan penanganan pandemi dan demokrasi di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa terjadi tumpang tindih respons sektoral pemerintah pusat dalam upaya tanggap pandemi. Selain itu, terlihat jelas kurang sinkronnya hubungan pusat dan daerah dalam merespons pandemi. Inisiatif pemerintah daerah

dan masyarakat sipil bermunculan ketika kebijakan pemerintah pusat belum terlihat pada awal pandemi. Akan tetapi, pemerintah pusat mempermasalahkan kebijakan pemerintah daerah tersebut dengan menggunakan dikotomi kewenangan pusat-daerah, terutama daerah dengan pimpinan yang secara politik dianggap berbeda dengan pemerintah pusat. Tarik menarik pusat dan daerah dalam penanganan pandemi pada akhirnya mengarah pada persepsi tentang adanya upaya penguatan sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, walaupun dikritik berbagai pihak, pada masa pandemi ini pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap kurang tepat waktu dan tepat guna, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme, serta penerapan secara ketat undang-undang untuk membatasi kebebasan berpendapat. Terdapat indikasi kuat bahwa partisipasi publik menjadi sangat terbatas pada keputusan-keputusan politik penting di masa pandemi.

Terkait dengan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme, penelitian ini menemukan dua kemungkinan penting untuk dicermati, yaitu: (1) rancangan peraturan presiden tersebut dikeluarkan karena pemerintah menilai peningkatan potensi ancaman kelompok ekstremisme berkekerasan di masa pandemi, atau (2) rancangan tersebut dikeluarkan saat pandemi untuk menghindari resistensi kuat dari masyarakat sipil.

2 Gejala Intoleransi Meningkat selama Pandemi Dapat Menjadi *Enabling Factor* untuk Radikalisasi

Tindakan intoleransi yang terjadi sebagian besar masih sama dengan yang terjadi sebelum adanya pandemi, misalnya adanya sebagian kelompok mayoritas yang menghalangi orang lain beribadah menurut kepercayaan agamanya atau menghalangi pembangunan rumah ibadah agama lain. Selain itu, pemerintah dan organisasi keagamaan juga mengeluarkan larangan beribadah di rumah ibadah di masa pandemi. Pelarangan ini mendapat kritik dari sebagian pihak karena tempat-tempat umum

lain, seperti pusat perbelanjaan tetap dibuka. Hal ini mengakibatkan sentimen negatif terhadap pemerintah semakin menguat di kalangan kelompok-kelompok konservatif dan intoleran.

Di sisi lain, berkembangnya kelompok-kelompok intoleran menjadi salah satu ajang bagi kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan untuk melakukan perekrutan. Misalnya, demo-demo menentang pemerintah yang dilakukan kelompok intoleran disusupi oleh kelompok ekstremisme berkekerasan untuk menemukan target-target perekrutan. Selanjutnya mereka menebalkan kebencian kepada pemerintah atas nama agama sehingga anggota kelompok intoleran tersebut bisa menjadi radikal dan ekstrem. Bagi kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan, pandemi dipandang sebagai waktu yang tepat untuk melakukan penyebaran paham mereka.

3 Respons Kelompok Ekstremisme Berkekerasan terhadap Pandemi dan Penurunan Demokrasi

Kelompok ekstremisme berkekerasan membangun narasi bahwa pandemi COVID-19 adalah azab dari Tuhan, yang merupakan balasan atas kezaliman pemerintah, baik di dalam negeri maupun secara global. Kelompok ekstremisme berkekerasan yang berafiliasi dengan ISIS di Indonesia juga mengamini narasi bahwa pandemi ini adalah tentara yang dikirim Tuhan untuk membalas kematian pemimpin mereka. Selanjutnya mereka membangun narasi bahwa masa pandemi ini adalah masa perang akhir zaman setelah kekalahan mereka di Irak dan Suriah. Di samping itu, kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan juga melakukan pemantauan secara aktif. Mereka memandang bahwa masa pandemi merupakan waktu yang tepat untuk melakukan serangan di saat pemerintah sedang lemah dan lengah karena merespons pandemi. Hal ini terkonfirmasi dari banyak penangkapan yang dilakukan aparat keamanan, yang mengindikasikan banyaknya plot-plot serangan yang dirancang oleh kelompok ekstremisme berkekerasan, misalnya di Poso, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan NTB. Akan tetapi, sebagian besar plot serangan tersebut bisa digagalkan

oleh aparat keamanan.

4 Perluasan Peran Militer dalam Penanganan Ekstremisme Berkekerasan

Penanganan ekstremisme berkekerasan idealnya menempatkan aktor negara dan nonnegara dalam posisi yang sama penting. Akan tetapi, pandemi COVID-19 ini membuat aktor-aktor sipil atau nonnegara mengalami kesulitan untuk bergerak karena pembatasan fisik dan sosial akibat upaya mengantisipasi penyebaran virus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beberapa kegiatan kontraekstremisme berkekerasan dan deradikalisasi terhambat karena pandemi. Sebaliknya, yang lebih terlihat adalah sekuritisasi penanganan ekstremisme berkekerasan pada masa pandemi dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain.

Tidak dapat dimungkiri bahwa dalam derajat tertentu pandemi COVID-19 juga melemahkan kemampuan aktor negara dan nonnegara dalam merespons ekstremisme berkekerasan. Realokasi sumber daya negara secara besar-besaran membuat kebutuhan peningkatan (*upgrade*) dukungan teknologi yang dibutuhkan Densus 88 Anti Teror menjadi terhambat. Visitasi staf BNPT untuk program deradikalisasi juga mengalami pengetatan, bukan saja karena sebagian dana dialihkan untuk merespons pandemi, tetapi juga karena pertemuan-pertemuan secara tatap muka sulit dilakukan di masa pandemi. Hal yang hampir sama juga menimpa organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang kontraekstremisme berkekerasan, di mana pandemi membuat kemampuan dan kesempatan mereka untuk melakukan dialog dan pencegahan radikalisme menjadi menurun.

Selain itu, rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam penanggulangan Terorisme juga memberikan legitimasi yang lebih besar pada upaya sekuritisasi penanggulangan ekstremisme berkekerasan tersebut. Publik mengkritisi rancangan Perpres tersebut karena sebagian isinya melampaui peran dan kewenangan TNI. Kecenderungan menguatnya sekuritisasi penanganan ekstremisme berkekerasan dalam rancangan Perpres tersebut harus ditelaah lebih serius, khususnya terkait

dengan implikasinya terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.

Sekuritisasi peran TNI dalam penanggulangan terorisme juga dapat berdampak pada penanganan jangka panjang setelah pandemi. Kecenderungan sekuritisasi dan juga dampak pandemi dapat mengakibatkan terjadinya ketergantungan pada aktor keamanan, khususnya TNI, akan semakin besar. Kondisi pasca COVID-19 yang menjadikan konsentrasi pemerintah dan berbagai pihak lebih pada pemulihan sektor ekonomi akan mempersulit Indonesia keluar dari kebijakan sekuritisasi penanganan terorisme ini. Terlebih lagi, sejarah Indonesia di masa lalu telah menunjukkan bahwa ketika posisi aktor-aktor keamanan sudah terlalu kuat maka upaya desekuritisasi akan sulit dilakukan sehingga mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

1 Penguatan kembali peran masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat

Memburuknya kualitas demokrasi selama pandemi perlu mendapat perhatian serius semua kalangan. Upaya-upaya perbaikan harus dilakukan, misalnya dengan memperkuat peran kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

2 Menjamin akuntabilitas, check and balance, dan evaluasi pelibatan aktor keamanan dalam penanganan COVID-19

Sekuritisasi penanganan pandemi telah berujung pada pelibatan aktif aktor-aktor keamanan dalam tugas-tugas di luar tugas utamanya. Harus diperhatikan bahwa kondisi ini bersifat sementara dalam situasi tidak normal seperti pandemi. Desekuritisasi dan pegembalian penanganan krisis kesehatan dan segala dampaknya ke dalam koridor politik normal harus segera dilakukan begitu situasi memungkinkan. Untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas aktor-aktor keamanan, dan sistem demokrasi secara keseluruhan, evaluasi terhadap pelibatan aktor-aktor keamanan

dalam penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan. Dalam konteks bahasan yang lebih luas, evaluasi juga sebaiknya mencakup pembahasan ulang dan mendalam tentang mekanisme pelibatan aktor-aktor keamanan dalam kondisi-kondisi darurat, termasuk mengenai definisi, durasi, batasan, dan sebagainya.

3 Program-program berbasis komunitas yang menguatkan kohesi sosial dan solidaritas perlu didorong untuk mengurangi meningkatnya eksklusivitas kelompok di masyarakat selama pandemi.

Di sejumlah tempat, pandemi COVID-19 telah memicu eksklusi sosial dan diskriminasi. Sebaliknya, di tengah masa-masa sulit pandemi ini masyarakat juga mampu menunjukkan solidaritas dan rasa kepedulian terhadap sesama, misalnya melalui kegiatan-kegiatan amal dan pemberian bantuan. Inisiatif-inisiatif berbasis komunitas ini harus terus didorong dan difasilitasi untuk memperkuat kembali kohesi sosial di tengah masyarakat.

4 Penguatan kembali kontranarasi

Sebagaimana fenomena di masyarakat umum, kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan ternyata juga menunjukkan ketahanannya terhadap dampak pandemi. Momentum pandemi justru digunakan untuk membangun narasi konspiratif untuk memperkuat ideologi ekstremisme berkekerasan dan mendelegitimasi otoritas negara. Untuk memutus dukungan terhadap kelompok ekstremisme berkekerasan selama dan sesudah pandemi, program-program kontranarasi perlu didorong kembali.

5 Transparansi, komunikasi publik terkait penanganan COVID-19, dan sinergi kebijakan lintas sektor dan pusat-daerah perlu ditingkatkan untuk melawan narasi ekstremisme berkekerasan

Dalam kaitannya dengan kontranarasi, pemerintah perlu terus mendorong transparansi informasi publik terkait penanganan COVID-19. Persoalan sinergi kebijakan lintas sektor dan antara pusat dan daerah juga perlu diperbaiki. Ketika masyarakat melihat dan percaya bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah efektif maka narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan yang berusaha mendelegitimasi pemerintah akan kehilangan kredibilitasnya.

6 Program mitigasi dampak pandemi harus bersifat inklusif

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan terhadap paparan ideologi ekstremisme berkekerasan, pemerintah dan masyarakat sipil harus memastikan bahwa program-program mitigasi dampak pandemi menyasar dan diterima secara inklusif oleh seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Program penanganan COVID-19 yang efektif dan inklusif akan membuat kelompok masyarakat yang merasa termarginalkan terhindar dari menjadi sasaran empuk rekrutmen kelompok ekstremisme berkekerasan.

Selain itu kerja sama antara aktor keamanan dan aktor-aktor lain, termasuk aktor nonnegara menjadi sangat penting dilakukan. Berbagai organisasi masyarakat sipil telah terbukti sangat aktif dan strategis dalam upaya menangani ekstremisme berkekerasan, baik dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal-ekstrem maupun dalam upaya-upaya deradikalisasi.

7 Rekomendasi mengenai riset lanjutan

Temuan-temuan dalam penelitian ini –penurunan demokrasi dan dinamika ekstremisme berkekerasan selama pandemi– harus ditempatkan dalam konteks sosial-politik Indonesia. Sebagian gejala yang ditemukan unik untuk kasus Indonesia sementara sebagian lain konsisten dengan tren global. Oleh karena itu, diperlukan riset lanjutan dengan fokus yang diperluas, misalnya melalui penelitian komparatif dengan negara-negara lain di kawasan. Penelitian tersebut dapat membantu memperkuat pemahaman atas dampak pandemi terhadap demokrasi dan ekstremisme berkekerasan baik secara nasional, regional, maupun global.

Daftar Pustaka

Sumber Buku dan Artikel

- Arif, Muhamad. (2020). Menyoal Peran TNI Dalam Penanggulangan Terorisme. *THC Insights*, No. 14.
- Avis, W. (2020). *The COVID-19 Pandemic and Response on Violent Extremist Recruitment and Radicalisation*, K4D Helpdesk Report 808. Brighton, UK: Institute of Development Studies.
- Bland, Ben. (2020). *Man of Contradictions: Jokowi and the Struggle to Remake Indonesia*. Sidney: Lowy Institute for International Policy
- Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Carothers, Thomas & O'Donohue, Andrew. (2020). *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace
- Coleman, J. (2020). *The Impact of Coronavirus on Terrorism in the Sahel*. International Centre for Counter Terrorism. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://icct.nl/publication/the-impact-of-coronavirus-on-terrorism-in-the-sahel/>
- Gary, A., & Hayley, P. (2020). *Terrorism and COVID-19: Actual and Potential Impacts*. *Perspectives on Terrorism*, 14(3), 59-73.
- Institute for Policy Analysis Conflict. (2020). *Covid-19 and The Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT)*. IPAC Short Briefing No.3
- Kruglanski, A. W., Gunaratna, R., Ellenberg, M., & Speckhard, A. (2020). *Terrorism in time of the pandemic: exploiting mayhem*. *Global Security: Health, Science and Policy*, 5(1), 121-132.
- Kurlantzick, Joshua. (2020). *Addressing the Effect of COVID-19 on Democracy in South and Southeast Asia*. Discussion Paper. Washington, D.C: Council on Foreign Relations
- Laksmana, Evan A., and Rage Taufika. (2020). *How 'Militarized' Is Indonesia's COVID-19 Management? Preliminary Assessment and Findings*. CSIS Commentaries, No. DMRU-075-EN (2020).
- Muhajir, Anton. (2020). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network
- Mukherji, R. (2020). *Covid vs. Democracy: India's Illiberal Remedy*. *Journal of Democracy*, 31(4), 91-105. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0058>.
- Mullins, S. (2020). *Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic on Terrorism and Counter-Terrorism: Practitioner Insights*. Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Power, T. P. (2018). *Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307-338.
- Repucci, S., & Slipowitz, A. (2020). *Democracy under lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom (Special Report)*. Washington: Freedom House.
- Seekings, J., & Natrass, N. (2020). *Covid vs. Democracy: South Africa's Lockdown Misfire*. *Journal of Democracy*, 31(4), 106-121. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0059>.
- Smith, A. E. (2020). *Covid vs. Democracy: Brazil's Populist Playbook*. *Journal of Democracy*, 31(4), 76-90. Tapsell, R. (2019). *Indonesia's Policing of Hoax News Increasingly Politicised*. Yusof Ishak Institute, ISEAS PERSPECTIVE, (75).
- Soufan Centre (2020). *Intel Brief: The Coronavirus will Increase Extremism Across the Ideological Spectrum*. Diakses pada 1 Desember 2020 dari <https://thesoufancenter.org/intelbrief-the-coronavirus-will-increase-extremism-across-the-ideological-spectrum/>
- The Editors. (2020). *Covid vs. Democracy*. *Journal of Democracy* 31, No. 4: 74–75. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0056>.
- Tim Peneliti The Habibie Center. (2018). *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme*. Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan, The Habibie Center, Edisi 01/Maret 2018.

- Wilson Centre (2020). What Islamists Are Doing and Saying on COVID-19 Crisis. Wilson Centre. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.wilsoncenter.org/article/what-islamists-are-doing-and-saying-covid-19-crisis>
- United nation Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic on Terrorism, Counter-Terrorism, and Countering Violent extremism. Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%9393-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf>
- Sumber Laman Berita**
- Adyatama, Egi. (2020, 15 November). KTT ASEAN-PBB, Jokowi Minta PBB Bantu Akses Vaksin dan Dorong Toleransi. Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/1405526/ktt-asean-pbb-jokowi-minta-pbb-bantu-akses-vaksin-dan-dorong-toleransi/full&view=ok>
- Akhlas, Adrian Wail. (2020, 2 September). Indonesia's 2021 economic recovery will not be at 'full power': Sri Mulyani. Diakses pada 03 Februari 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/02/indonesias-2021-economic-recovery-will-not-be-at-full-power-sri-mulyani.html>
- Alfons, Matius. (2020, 31 Maret). Polisi Tangkap 3 Orang Terkait Hoax Corona Di Jakarta Utara. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4959095/polisi-tangkap-3-orang-terkait-hoax-corona-di-jakarta-utara>
- Alfons, Matius. Imparsial: Ada 31 Kasus Intoleransi di Indonesia, Mayoritas Pelarangan Ibadah. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial-ada-31-kasus-intoleransi-di-indonesia-mayoritas-pelarangan-ibadah>
- Ardito Ramadhan. (2019, 30 Juli). Mengenal Koopssus TNI, Satuan Elite Gabungan Tiga Matra TNI. Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/11254361/mengenal-koopssus-tni-satuan-elite-gabungan-tiga-matra-tni?page=all>
- Aria, Pingit. (2020, 14 April). Dampak Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19 Terhadap Anggaran. Diakses pada 1 Januari 2021, dari <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a41c97e9e4/dampak-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19-terhadap-anggaran>
- Bardan, Abdul Basith. (2020, 3 November). Pengamat: Ada Dua Poin Kuat Untuk Menggugat Omnibus Law. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-ada-dua-poin-kuat-untuk-menggugat-omnibus-law>
- Briantika, Adi. (2020, 15 Mei). Mengapa Perpres TNI Tangani Terorisme Dianggap Bermasalah?. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://tirto.id/mengapa-perpres-tni-tangani-terorisme-dianggap-bermasalah-ftQI>
- CNN Indonesia. (2020, 3 Desember). Mahfud MD: Terorisme Tak Berkurang di Tengah Pandemi Covid. Diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201202161646-20-577164/mahfud-md-terorisme-tak-berkurang-di-tengah-pandemi-covid>
- CNN Indonesia. (2020, 4 Oktober). Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Disebut Akal-akalan. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201004030725-32-554082/perpres-pelibatan-tni-tangani-terorisme-disebut-akal-akalan>
- CNN Indonesia. (2020, 8 Juni). Densus 88 Bekuk Terduga Teroris JAD di Cirebon dan Kalsel. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200608174922-12-511144/densus-88-bekuk-terduga-teroris-jad-di-cirebon-dan-kalsel>
- DA, Ady Thea. (2020, 11 Juni). Akhiri Polemik Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Ketentuan Ini Perlu Dicabut. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee0d0420950a/akhiri-polemik-pelibatan-tni-tangani-terorisme--ketentuan-ini-perlu-dicabut>
- Divisi Humas POLRI. (2020, 31 Maret). Polri Tetapkan 51 Tersangka Hoax Terkait Corona. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://humas.polri.go.id/2020/03/31/polri-tetapkan-51-tersangka-hoax-terkait-corona/>
- Ghaliya, Ghina. (2020, 9 Juni). Electability of Governors Ganjar, Ridwan Rises amid COVID-19's 'Electoral Incentives': Survey. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/electability-of-governors-ganjar-ridwan-rises-amid-covid-19s-electoral-incentives-survey.html>
- Gorbiano, Marchio Irfan, and Ghina Ghaliya. (2020, 1 April). Turf War Undermines COVID-19 Fight in Indonesia. Diakses pada

- 29 Desember 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/turf-war-undermines-covid-19-fight-indonesia-government-jokowi-anies.html>.
- Halim, Devina. (2020, 5 Oktober). Soal Telegram Kapolri Berisi Perintah Patroli Siber, Polri: Untuk Cegah Hoaks Omnibus Law. Diakses pada 20 Desember 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/15125181/soal-telegram-kapolri-berisi-perintah-patroli-siber-polri-untuk-cegah-hoaks?page=all>.
- Hamid, Usman. (2019, 25 November). Indonesia's Information Law Has Threatened Free Speech for More than a Decade. This Must Stop. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://theconversation.com/indonesias-information-law-has-threatened-free-speech-for-more-than-a-decade-this-must-stop-127446>.
- Human Rights Watch. (2020, 9 April). Indonesia: Little Transparency in COVID-19 Outbreak. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://www.hrw.org/news/2020/04/09/indonesia-little-transparency-covid-19-outbreak>.
- Ilman, Nafi'an, Muhammad. (2020, 30 Maret). Polda Metro Tangkap Penyebar Hoax Cipinang Melayu Lockdown-Penutupan Tol. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4958705/polda-metro-tangkap-penyebar-hoax-cipinang-melayu-lockdown-penutupan-tol>
- Ilman, Nafi'an, Muhammad. (2020, 30 Maret). Polda Metro Tangkap Penyebar Hoax Cipinang Melayu Lockdown-Penutupan Tol. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4958705/polda-metro-tangkap-penyebar-hoax-cipinang-melayu-lockdown-penutupan-tol>.
- Indonews.com. (2020, 22 September). Umat Gereja di Jonggol Mengaku Dilarang Beribadah. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.koranindonews.com/2020/09/22/umat-gereja-di-jonggol-mengaku-dilarang-beribadah>
- innews.co.id. (2020, 27 September). Bupati Aceh Singkil Hentikan Pembangunan Rumah Pendeta. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://innews.co.id/bupati-aceh-singkil-hentikan-pembangunan-rumah-pendeta>
- Kompas.com. (2020, 12 Agustus). Kasus Pembubaran Paksa Acara Midodareni di Solo, Kapolda Jateng: Kita Kejar Pelaku Lainnya. Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/07000091/kasus-pembubaran-paksa-acara-midodareni-di-solo-kapolda-jateng--kita-kejar?page=all>
- Marison, Walda. (2020, 28 Oktober). Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-muslim. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/28/09441991/kronologi-ulah-rasial-guru-sma-di-jaktim-tiba-tiba-ajak-murid-tak-pilih>
- Nalle, V. I. (2020, 16 Oktober). Bagaimana UU Cipta Kerja merusak desentralisasi yang dibangun setelah reformasi. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://theconversation.com/bagaimana-uu-cipta-kerja-merusak-desentralisasi-yang-dibangun-setelah-reformasi-148091>
- Nugroho, AS & Yusuf, Ali. (2020, 21 Mei). Penutupan Tempat Ibadah Mulai Menggelisahkan., Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://www.republika.id/posts/6874/penutupan-tempat-ibadah-mulai-menggelisahkan>.
- Prabowo, Haris. (2019, 11 November). Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://tirto.id/daftar-skor-indeks-kerukunan-beragama-versi-kemenag-2019-engH>
- Purnamasari, Deti Mega. (2020, 29 Maret). Imbauan Sejumlah Organisasi Keagamaan Terkait Ibadah di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses pada 11 Desember 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/29/09243331/imbau-an-sejumlah-organisasi-keagamaan-terkait-ibadah-di-tengah-pandemi-covid?page=all>
- Putra, Nanda Perdana. (2020, 25 Oktober). Survei Indikator Tunjukkan Meningkatnya Ancaman Kebebasan Sipil di Indonesia. Diakses pada 03 Februari 2020, dari <https://www.liputan6.com/news/read/4391541/survei-indikator-tunjukkan-meningkatnya-ancaman-kebebasan-sipil-di-indonesia>
- Raharjo, Dwi Bowo. (2020, 17 September). Sekelompok Orang Ganggu Ibadah Jemaat HKBP Serang, Ketum PKPI: Memalukan. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.suara.com/news/2020/09/17/203950/sekelompok-massa-ganggu-ibadah-jemaat-hkbp-serang-ketum-pkpi-memalukan?page=all>
- Rezgisari, Indira. (2020, 3 Desember). Kotak Amal Minimarket dan Dugaan Pendanaan Jamaah Islamiyah. Diakses pada 8 Desember 2020, dari <https://republika.co.id/berita/qkr3ej328/kotak-amal-emminimarketem-dan-dugaan-pendanaan-jamaah-islamiyah>
- Salim, Hanz Jimenez. (2020, 5 Februari). Cek Fakta: Klaim Virus Corona untuk Musnahkan Uighur tapi Malah Bocor di Wuhan,

Faktanya?. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4172296/cek-fakta-klaim-virus-corona-untuk-musnahkan-ughur-tapi-malah-bocor-di-wuhan-faktanya>

Santoso, Bangun. (2020, 28 September). Heboh Larangan Beribadah di Desa Ngastemi, Ketum PKPI: Tindakan Bodoh!. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.suara.com/news/2020/09/28/074649/heboh-larangan-beribadah-di-desa-ngastemi-ketum-pkpi-tindakan-bodoh?page=all>

Sari, Haryanti Puspa. (2020, 22 Juli). Survei Charta Politika: TNI, Lembaga Dengan Tingkat Kepercayaan Tertinggi. Diakses pada 1 Januari 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/19095841/survei-charta-politika-tni-lembaga-dengan-tingkat-kepercayaan-tertinggi>.

Siregar, Raja Adil. (2020, 3 Maret). Sebar Video Hoax Pasien Positif Corona, Juru Parkir Di Palembang Ditangkap. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4958534/sebar-video-hoax-pasien-positif-corona-juru-parkir-di-palembang-ditangkap>

Tehusijarana, Karina M. (2020, 22 Januari). Indonesia, once regional model, falls further behind Malaysia in democracy rankings. Diakses pada 03 Februari, dari <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html>

Tim detikcom. (2020, 7 April). Bola Salju Kasus Ali Baharsyah Hina Jokowi Via Isu Wabah. Diakses pada 29 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial-ada-31-kasus-intoleransi-di-indonesia-mayoritas-pelarangan-ibadah>

Tim detikcom. (2020, 28 September). Kenapa Intelijen Terlibat Tangani COVID-19? Ini Penjelasan BIN. Diakses pada 30 Januari 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5191310/kenapa-intelijen-terlibat-tangani-covid-19-ini-penjelasan-bin>

Tim detikcom. (2020, 5 April). Darurat Corona, Polri Patroli Khusus Pantau Hoax Dan Penghinaan Presiden. Diakses pada 29 Desember 2020, dari https://news.detik.com/berita/d-4966256/darurat-corona-polri-patroli-khusus-pantau-hoax-dan-penghinaan-presiden?utm_source=twitter&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news.

Warta Ekonomi. (2020, 2 Desember). 49 Pekerja China yang Masuk Indonesia Ternyata Orang Baru. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read276842/buset-49-pekerja-Tionghoa-yang-masuk-indonesia-ternyata-orang-baru>,

Welby, P. (2020). What the virus pandemic means for violent extremists. Diakses pada 1 Desember 2020, dari <https://www.arabnews.com/node/1661016>

Wicaksono, Pribadi. (2020, 14 Januari). DPRD Minta Pembina Pramuka Ajarkan 'Islam Yes Kafir No' Dihukum. Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/1295087/dprd-minta-pembina-pramuka-ajarkan-islam-yes-kafir-no-dihukum>

Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil. (2020, 9 Mei). Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM di Indonesia, diakses pada 7 Desember 2020, dari <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Siaran-Pers-Perpres-TNI-9-mei-2019.pdf>

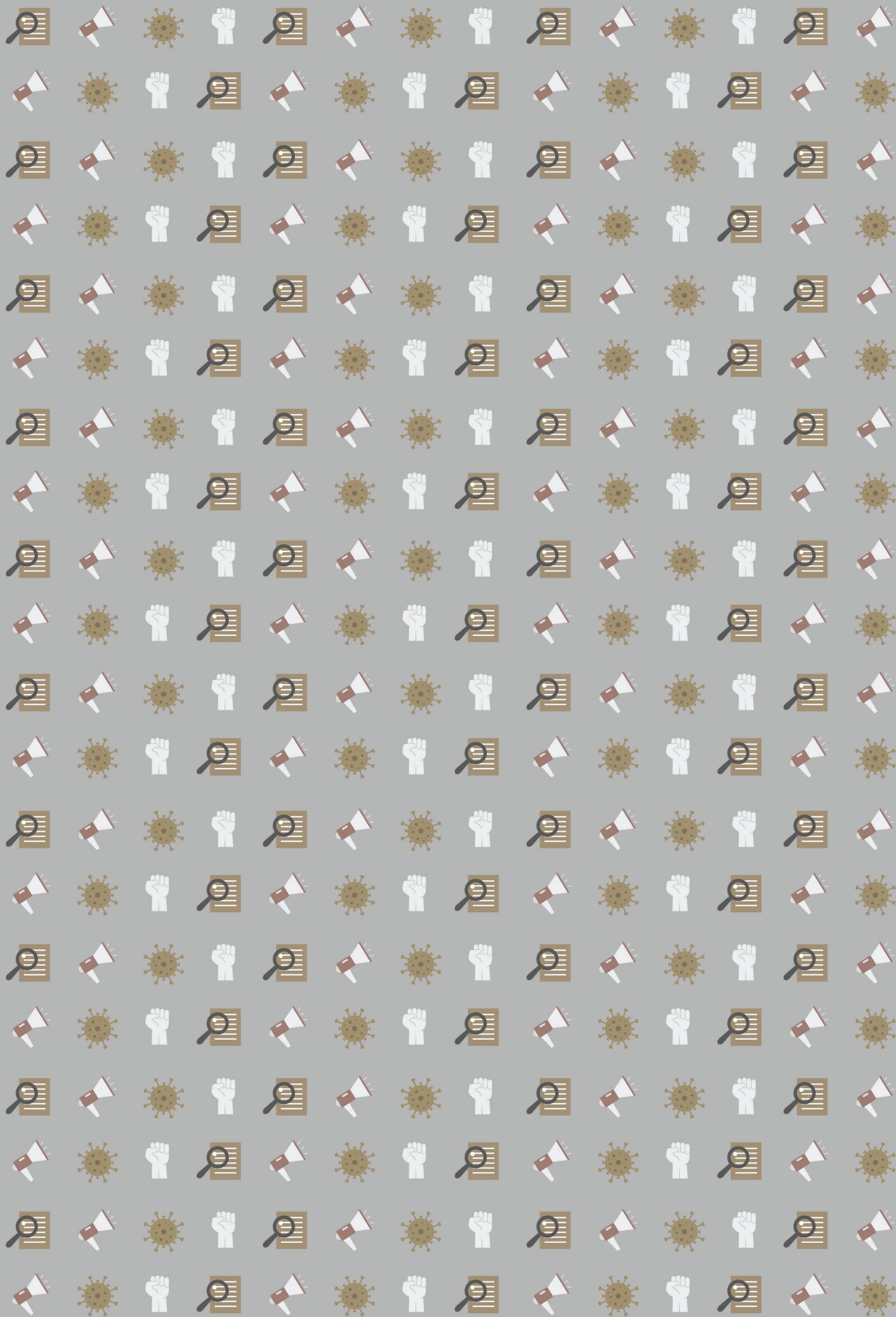
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019, 8 Agustus). Press Release, Perpres Pelibatan Tni Dalam Tindak Pidana Terorisme, Anomali Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Diakses pada?, dari [https://www.komnasham.go.id/files/20190808-perpres-pelibatan-tni-dalam-tindak-\\$J0DSM.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190808-perpres-pelibatan-tni-dalam-tindak-$J0DSM.pdf)

Lain-lain

"Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan." The Habibie Center, September 23, 2020.

"Focus Group Discussion Covid-19, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan." The Habibie Center, January 27, 2021.

Alfons, Matius. (2019, 11 November).



THE HABIBIE CENTER

Jl. Kemang Selatan no. 98 Jakarta 12560 - Indonesia

Phone: (62-21) 7817211 | Fax: (62-21) 7817212

E-mail: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id